

**ANALISIS SITUASI PENYEDIAAN  
DAN TINGKAT KETERSEDIAAN PANGAN  
KOTA DEPOK**



*Disusun Oleh*  
**YAYAT HERYATNO, SP, MPS**

**DEPARTEMEN GIZI MASYARAKAT  
FAKULTAS EKOLOGI MANUSIA - IPB UNIVERSITY  
TAHUN 2025**

## **RINGKASAN EKSEKUTIF**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan No.18 Tahun 2012). Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional yang dilaksanakan di setiap daerah. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat pilar yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) cadangan pangan; (3) penganekaragaman konsumsi pangan; dan (4) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan wilayah merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan penduduk.

Situasi ketersediaan pangan menunjukkan jumlah dan jenis pangan yang tersedia untuk penduduk yang akan mengalami variasi dari waktu ke waktu maupun antara satu tempat dengan tempat lain. Hal tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan baik politik, iklim, jenis tanah, teknologi pertanian, cara penyimpanan pangan, sarana transportasi dan pemasaran. Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen data statististik yang dapat memberikan informasi mengenai situasi ketahanan pangan di suatu wilayah, khususnya untuk aspek ketersediaan pangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Melalui analisis situasi ketersediaan pangan secara kuantitatif dengan menggunakan NBM yang memberikan informasi mengenai data produksi, pengadaan serta semua perubahan yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui sejauh mana kondisi bahan makanan yang tersedia dan siap untuk dikonsumsi penduduk.

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis situasi penyediaan dan tingkat ketersediaan pangan wilayah Kota Depok berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2023 dengan pendekatan Pola Pangan Harapan. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk : 1). Menghitung situasi penyediaan dan menganalisis tingkat kemandirian pangan wilayah Kota Depok; 2). Menganalisis tingkat ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Desain analisis yang digunakan adalah explorative study dengan menggali sebanyak-banyaknya data dan informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Fokus utama dalam kajian ini adalah analisis situasi penyediaan dan ketersediaan pangan wilayah Kota Depok yang didasarkan pada hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok. Perhitungan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM

Kota Depok sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas/intansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, khususnya : Badan Pusat Statistik; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan; dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta intansi-intansi terkait lainnya. Jenis data dasar yang dikumpulkan dan digunakan untuk menghitung NBM mencakup data jumlah produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor pangan selama satu tahun.

Berbagai teknik perhitungan serta faktor konversi yang digunakan dalam menyusun Neraca Bahan Makanan Kota Depok mengacu pada Buku Panduan Neraca Bahan Makanan Nasional yang disusun oleh Badan Pangan Nasional Tahun 2023. Perhitungan dan penyusunan NBM dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Analisis Neraca Bahan Makanan yang dikembangkan atas kerjasama tim Badan Ketahanan Pangan Nasional, Kementerian Pertanian dan tim Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia – Institut Pertanian Bogor.

Salah satu ukuran tingkat kemandirian pangan wilayah adalah dengan menelaah tingkat swasembada pangan yang diukur berdasarkan seberapa besar penyediaan pangan dalam suatu wilayah dapat dipenuhi dari hasil produksi di wilayah sendiri. Disisi lain dapat pula dikaji dari sudut Tingkat ketergantungan yang diukur berdasarkan besarnya penyediaan pangan dalam suatu wilayah yang harus dipenuhi melalui impor pangan dari luar daerah. Secara sederhana tingkat ketergantungan wilayah diukur berdasarkan tingkat atau perbandingan yang dinyatakan dalam persen antara jumlah impor dengan total penyediaan pangan dalam wilayah yang merupakan hasil perhitungan jumlah produksi ditambah perubahan stok dan impor dikurangi ekspor. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah impor pangan akan melebihi jumlah penyediaan dalam wilayah dengan kata lain Tingkat ketergantungan terhadap impor lebih dari 100 persen.

Secara umum berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Depok, sebagian besar pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk di wilayah Kota Depok diperoleh dari pasokan dari luar daerah. Estimasi volume total penyediaan pangan di wilayah Kota Depok tahun 2023 mencapai lebih dari 900 ribu ton yang sebagian besar penyediaannya tergantung pasokan dari luar wilayah (96,5%).

Komoditas utama pangan kelompok padi-padian adalah beras dengan total ketersediaan mencapai 242.221,9 ton (114,1 kg/kapita) per tahun. Ubi kayu adalah kelompok komoditas makanan berpati yang paling dominan ketersediaannya yaitu sekitar 40.873,4 ton (19,2 kg/kapita) per tahun. Ketersediaan gula pasir mencapai 12.522,7 ton (5,9 kg/kapita) per tahun. Sementara itu, ketersediaan pangan kelompok buah/biji berminyak yang paling dominan adalah kacang kedelai yang mencapai sekitar 25.904,6 ton (12,2 kg/kapita) per

tahun. Rata-rata ketersediaan pangan kelompok buah-buahan yang paling banyak ketersediaannya adalah pisang (31.146,8 ton atau sekitar 17,7 kg/kapita), dan jeruk (26.072,5 ton atau sekitar 12,3 kg/kapita). Adapun komoditas pangan kelompok sayuran yang tingkat ketersediaannya paling besar adalah cabai yaitu sekitar 28.772,9 ton (11,2 kg/kapita). Komoditas sayuran lain yang memiliki tingkat ketersediaan yang relatif signifikan adalah sawi sekitar 13.415,7 ton (6,3 kg/kapita), bayam sekitar 12.520,5 ton (5,9 kg/kapita), kangkung sekitar 12.404,9 ton (5,8 kg/kapita), dan bawang merah sekitar 9.912,6 (4,7 kg/kapita) per tahun.

Komoditas kelompok daging dengan tingkat ketersediaan paling tinggi di Kota Depok adalah daging ayam ras yaitu sekitar 43.011,1 ton (20,3 kg/kapita) per tahun dan daging sapi sekitar 23.236 ton (10,9 kg/kapita) per tahun. Tingkat ketersediaan telur ayam ras untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 mencapai sekitar 32.158,5 ton (15,1 kg/kapita). Sementara itu, produk susu impor ketersediaannya mencapai 15.297,8 ton atau rata-rata sekitar 11,9 kg/kapita per tahun.

Pangan kelompok ikan yang jumlah ketersediaannya cukup signifikan pada tahun 2023 adalah ikan tongkol yang mencapai sekitar 6.736,1 (3,2 kg/kapita), kembung sekitar 9.693 (4,6 kg/kapita), bandeng sekitar 2.623,3 ton (1,2 kg/kapita), mujair sekitar 5.350,3 ton (2,5 kg/kapita), ikan mas sekitar 9.216,0 (4,3 kg/kapita), dan ikan lainnya sekitar 15.552,0 ton (7,3 kg/kapita) per tahun. Ketersediaan pangan kelompok minyak dan lemak sebagian besar dalam bentuk minyak sawit, yaitu sekitar 38.138,2 (18,0 kg/kapita) per tahun. Sementara tingkat ketersediaan minyak kelapa dan lemak relatif kecil dibandingkan dengan tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Depok pada tahun 2023 adalah sekitar 2.619 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berarti Tingkat Ketersediaan Energi (TKE) di Kota Depok mencapai sekitar 109,1 %AKE pada tahun 2023. Sementara itu, ketersediaan protein mencapai sebesar 86,5 gram/kapita/hari sehingga Tingkat Ketersediaan Protein (TKP) di Kota Depok telah mencapai 139,4 %AKP.

Kelompok pangan padi-padian masih menjadi penyumbang energi terbesar terhadap ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok, yaitu sekitar 1.378 kkal energi (57,4 %AKE) Penyumbang ketersediaan energi lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kelompok minyak dan lemak, dan kelompok pangan hewani dimana pada tahun 2023 kontribusi energi masing-masing kelompok pangan tersebut berturut-turut mencapai sekitar 375 kkal (15,6% AKE), dan 444 (18,5% AKE). Sejalan dengan ketersediaan energi, kelompok pangan pangan hewani dan padi-padian merupakan penyumbang terbesar terhadap

ketersediaan protein di wilayah Kota Depok. Pada tahun 2023, sebagian besar protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kota Depok bersumber dari kelompok padi-padian yaitu sekitar 34,4 gram protein (55,5% AKP) dan kekompok pangan hewani sekitar 33,6 gram protein (54,2% AKP). Penyumbang ketersediaan protein lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kacang-kacangan yaitu sekitar 13,9 gram (22,3% AKP).

Kelompok pangan yang ketersediaannya telah melebihi angka kecukupannya adalah pangan kelompok padi-padian (lebih 1311 kkal atau 54,1% AKE), pangan hewani (370 kkal atau 15,4 % AKE, minyak dan lemak (lebih 240 kkal atau 18,3% AKE), dan kacang-kacangan (125 kkal atau 5,2 % AKE). Adapun kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain ketersediaanya masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan, dimana masih terdapat kekurangan masing-masing sekitar 65 kkal, 71 kkal, 44 kkal, 20 kkal, dan 42 kkal per kapita/hari.

Secara umum, hasil analisis kualitas ketersediaan pangan menunjukkan bahwa meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Depok telah melebih angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Oleh karena itu, meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Depok telah melebih angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan di wilayah di Kota Depok pada tahun 2023 baru mencapai 94,1 atau kurang 5,6 poin dari skor PPH ideal 100.

Tinginya tingkat penyediaan pangan di suatu wilayah tidak dapat menjadi ukuran terjaminnya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk. Pola penanganan dan penggunaan pangan di suatu wilayah sejak pasca panen sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat konsumen sangat menentukan tingkat ketersediaan pangan. Berdasarkan tingkat ketersediaan pangan wilayah Kota Depok Tahun 2023, baik dari segi kuantitas ketersediaan energi dan protein serta kontribusi masing-masing kelompok pangan maupun skor PPH, menunjukkan bahwa kuantitas ketersediaan pangan yang tinggi di Kota Depok tidak menjadi jaminan baiknya kualitas ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Oleh karena itu, selain mempertahankan tingkat ketersediaan pangan yang sudah dicapai, ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok masih perlu ditingkatkan keragamannya.

Jenis-jenis komoditas pangan yang masih perlu ditingkatkan jumlah dan kontribusinya adalah kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. Jika dikaitkan dengan ketergantungan wilayah terhadap pangan impor untuk kelompok komoditas tersebut yang relatif lebih rendah, khususnya kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan,

maka peningkatan ketersediaan kelompok pangan tersebut masih dimungkinkan. Upaya peningkatan penyediaan pangan yang bersumber dari produksi merupakan alternatif strategis yang dapat ditempuh di wilayah Kota Depok, mengingat masih cukup tingginya potensi sumberdaya alam untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah Kota Depok.

Tingginya tingkat ketergantungan ketersediaan energi terhadap pangan kelompok padi-padian, khususnya tepung terigu, dan juga kelompok susu akan menjadi beban perekonomian yang cukup berat bagi wilayah Kota Depok dalam upaya penyediaan pangan, karena tingkat ketergantungan impor untuk kelompok pangan tersebut sangat tinggi. Pengadaan pangan melalui impor dari wilayah lain atau bahkan luar negeri menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayah Kota Depok. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang terkait dengan penyediaan, pemasaran, dan distribusi pangan di dalam maupun dari dan ke luar wilayah Kota Depok harus mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan ketersediaan pangan wilayah di Kota Depok.

Melalui program penguatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana penyimpanan dan distribusi pangan diharapkan dapat menekan tingkat kehilangan pangan akibat tercerer dan rusak selama penyimpanan dan pendistribusian, sehingga sedikit banyak akan meningkatkan ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi. Tingkat ketergantungan yang tinggi suatu wilayah terhadap pangan impor secara konseptual tidak menjadi masalah asalkan : (1) PAD yang digunakan untuk mengimpor cukup memadai, (2) analisis secara teknis dan ekonomis untuk wilayah tersebut lebih baik impor daripada produksi, dan (3) ketersediaan pangan tersebut di pasar regional atau nasional terjamin. Untuk kasus Kota Depok, ketergantungan pangan terhadap impor nampaknya bukan menjadi masalah utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa (1) secara teknis dan ekonomis wilayah Kota Depok kurang layak untuk melakukan kegiatan produksi pangan, khususnya komoditas pangan dimana lahan pertanian menjadi faktor utama produksi (2) sumberdaya atau pendapatan daerah yang tersedia untuk mengimpor pangan relatif memadai, dan (3) kebutuhan pangan di wilayah Kota Depok sebagai permintaan pasar bagi wilayah-wilayah lain yang menjadi sentra produksi pangan merupakan potensi investasi daerah di bidang agribisnis.

Strategi lain yang dapat dapat ditempuh adalah dengan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar secara bertahap dapat menyesuaikan dengan standar PPH yang dianjurkan. Sejalan dengan perbaikan pola konsumsi, maka penyedian kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya sudah jauh melebihi angka yang dianjurkan dapat diturunkan secara bertahap pula. Namun demikian, penurunan ketersediaan kelompok pangan tersebut harus pula diimbangi pula dengan peningkatan ketersediaan pangan kelompok yang kontribusinya

masih rendah, khususnya untuk kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan saur-sayuran.

Demikian hasil analisis situasi ketersediaan pangan wilayah berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok Tahun 2003 telah disusun dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program bidang ketahanan pangan di Kota Depok di masa yang akan datang. Agar data dan informasi yang disajikan melalui analisis tersebut memiliki relevansi dan akurasi yang memadai untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan program ketahanan pangan di Kota Depok, maka kegiatan analisis harus dilaksanakan secara reguler dan lebih komprehensif setiap tahunnya.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga karya ilmiah Analisis Situasi Penyediaan dan Tingkat Ketersediaan Pangan Kota Depok dapat diselesaikan. Hasil kajian ini merupakan pengembangan dari laporan kegiatan penyusun sebagai tenaga ahli pendamping pada Sub Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tahun Anggaran 2024 di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu instrumen data statististik yang dapat memberikan informasi mengenai situasi ketahanan pangan di suatu wilayah, khususnya untuk aspek ketersediaan pangan, baik di tingkat nasional maupun provinsi dan kabupaten/kota. Melalui analisis situasi ketersediaan pangan secara kuantitatif dengan menggunakan NBM yang memberikan informasi mengenai data produksi, pengadaan serta semua perubahan yang terjadi di suatu wilayah dapat diketahui sejauh mana kondisi bahan makanan yang tersedia dan siap untuk dikonsumsi penduduk. Dalam konteks pembangunan, NBM yang secara khusus menyajikan informasi penting tentang situasi ketersediaan pangan tersebut mempunyai arti yang sangat strategis. Informasi yang dikandung dalam NBM berguna sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan ketahanan pangan. Dengan demikian dapat dibuat perencanaan yang lebih tepat dan dijadikan dasar penyusunan strategi penyediaan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, khususnya Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Peternakan Kota Bogor serta Dinas-Dinas terkait Ketahanan Pangan, Badan Pusat Statistik Kota Depok dan Badan Pangan Nasional. Semoga informasi yang disajikan dalam NBM ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terkait dengan pembangunan ketahanan pangan.

Bogor, Maret 2025

Penyusun  
Yayat Heryatno  
Departemen Gizi Masyarakat  
FEMA – IPB University

## DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF .....	i
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	ix
I. PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan .....	3
C. Kegunaan .....	3
II. LANDASAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORITIS .....	4
A. Landasan Hukum dan Kebijakan.....	4
B. Landasan Teoritis dan Metodologis.....	9
III. DESAIN DAN METODE ANALISIS .....	13
A. Desain dan Cakupan Analisis .....	13
B. Jenis dan Sumber Data.....	13
C. Pengolahan dan Analisis Data .....	15
IV. KEADAAN UMUM WILAYAH .....	23
A. Geografis.....	23
B. Agroekologi .....	25
C. Demografi .....	29
D. Ekonomi.....	30
V. SITUASI PENYEDIAAN PANGAN .....	32
A. Kontribusi Penyediaan Per Kelompok Pangan.....	32
B. Tingkat Penyediaan Per Komoditas Pangan.....	33
VI. TINGKAT KETERSEDIAAN PANGAN .....	43
A. Kontribusi Ketersediaan Per Kelompok Pangan .....	43
B. Tingkat Ketersediaan Per Komoditas Pangan .....	44
VII. KUALITAS KETERSEDIAAN PANGAN .....	53
A. Ketersediaan Energi dan Protein .....	53
B. Skor Pola Pangan Harapan .....	55
VIII. PENUTUP .....	58
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	60
DAFTAR PUSTAKA .....	62
LAMPIRAN.....	63

## DAFTAR TABEL

Tabel II.B.2.	Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional .....	11
Tabel III.B.1.	Jenis dan Sumber Data Pokok Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	14
Tabel III.C.1.	Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional Untuk Tingkat Ketersediaan .....	22
Tabel IV.A.1.	Data Umum Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Depok Tahun 2023.....	24
Tabel V.A.1.	Estimasi Volume Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	33
Tabel V.B.1.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Padi-padian Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	34
Tabel V.B.2.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Makanan Berpati di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	34
Tabel V.B.3.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	35
Tabel V.B.4.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	36
Tabel V.B.5.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	37
Tabel V.B.6.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	38
Tabel V.B.7.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Daging di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	39
Tabel V.B.8.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Telur di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	40
Tabel V.B.9.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Susu di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	40
Tabel V.B.10.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Ikan di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	41
Tabel V.B.11.	Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Minyak dan Lemak di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	42

Tabel VI.A.1. Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	44
Tabel VI.B.1. Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	45
Tabel VI.B.2. Ketersediaan Pangan Kelompok Makanan Berpati Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	45
Tabel VI.B.3. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Gula Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	46
Tabel VI.B.4. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah/Biji Berminyak Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	46
Tabel VI.B.5. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah-Buahan Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	47
Tabel VI.B.6. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	48
Tabel VI.B.7. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	49
Tabel VI.B.8. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Telur Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	50
Tabel VI.B.9. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Susu Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	50
Tabel VI.B.10. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Ikan Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	51
Tabel VI.B.11. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Minyak dan Lemak Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	52
Tabel VII.A.1. Tingkat Kecukupan Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	54
Tabel VII.A.2. Jumlah dan Kontribusi Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	54
Tabel VII.B.1. Jumlah, Kontribusi dan Gap Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok .....	56
Tabel VII.B.2. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Wilayah Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.....	57

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya Pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan (Undang-undang Pangan No. 18 Tahun 2012). Program peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan di Indonesia. Pencapaian ketahanan pangan nasional yang diawali dengan perwujudan ketahanan pangan di tingkat rumah tangga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Negara atau wilayah dapat dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik jika mampu menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya. Dengan demikian, terdapat suatu jaminan bagi seluruh penduduk untuk memperoleh pangan dan gizi yang cukup untuk menghasilkan generasi yang sehat dan cerdas.

Ketahanan Pangan menghendaki kecukupan ketersediaan pangan bagi setiap rumah tangga, maupun akses rumah tangga terhadap pangan yang dibutuhkan oleh setiap anggotanya. Pemantapan ketahanan pangan merupakan salah satu fokus dari pembangunan nasional yang dilaksanakan di setiap daerah. Perwujudan ketahanan pangan dapat dicapai melalui empat pilar yaitu: (1) ketersediaan pangan; (2) cadangan pangan; (3) penganekaragaman konsumsi pangan; dan (4) pencegahan dan penanggulangan masalah pangan. Dengan demikian, ketersediaan pangan wilayah merupakan prasyarat terwujudnya ketahanan pangan penduduk.

Ketahanan pangan menyangkut ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pengadaannya. Di samping aspek produksi, ketahanan pangan mensyaratkan pendapatan yang cukup bagi masyarakat untuk mengakses bahan pangan, keamanan pangan, serta aspek distribusi. Dalam era globalisasi dan perdagangan bebas yang sangat kompetitif di pasar internasional, Indonesia menghadapi tantangan berat dalam merumuskan kebijakan pangan yang mampu memenuhi kebutuhan pangan penduduk. Kebijakan pangan yang dimaksud antara lain adalah upaya mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan ragam komoditas pangan dan upaya peningkatan diversifikasi ketersediaan dan konsumsi pangan.

Ketersediaan pangan merupakan faktor penting dalam memenuhi kebutuhan gizi, terutama untuk peningkatan gizi masyarakat dan merupakan fondasi yang sangat penting dalam pembangunan sumber daya manusia suatu bangsa. Salah satu standar pencapaian pembangunan pangan dan gizi adalah ketersediaan pangan yang memenuhi kebutuhan energi sebesar 2.400 kkal/kapita/hari serta 62 gram protein dengan skor PPH ideal 100. Kekurangan

pangan berpotensi memicu keresahan dan berdampak pada masalah sosial, keamanan dan ekonomi. Situasi ketersediaan pangan menunjukkan jumlah dan jenis pangan yang tersedia untuk penduduk yang akan mengalami variasi dari waktu ke waktu maupun antara satu tempat dengan tempat lain. Hal tersebut sangat tergantung pada kondisi lingkungan baik politik, iklim, jenis tanah, teknologi pertanian, cara penyimpanan pangan, sarana transportasi dan pemasaran. Faktor akses inividu dalam menjangkau kebutuhan pangan yang diperlukan merupakan faktor kunci ketahanan pangan di tingkat rumah tangga. Akses individu terhadap pangan yang dibutuhkan sangat dipengaruhi oleh daya beli, tingkat pendapatan, harga pangan, proses distribusi pangan, kelembagaan di tingkat lokal dan faktor sosial lainnya.

Penyediaan pangan sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk merupakan masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Oleh karena itu diperlukan suatu upaya atau cara yang cepat, teliti dan mudah untuk memahami situasi ketersediaan pangan di suatu wilayah pada periode tertentu. Salah satu cara untuk memperoleh gambaran situasi tersebut dapat dituangkan dalam suatu neraca atau tabel yang disebut dengan Neraca Bahan Makanan (NBM) atau Food Balance Sheet (FBS). NBM disusun untuk memperoleh gambaran atau evaluasi penyediaan pangan mulai dari produksi, pengadaan (pangan masuk/import, pangan keluar/ekspor, stock) dan penggunaan (pakan ternak, bibit, industri) sehingga tersedia untuk dikonsumsi.

Tujuan penyusunan NBM adalah untuk mengetahui gambaran pengadaan (produksi, import, stok/cadangan) dan penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah pada waktu tertentu (setiap tahun). Selain itu, untuk memperoleh gambaran detail tentang tingkat ketersediaan pangan (defisit atau surplus), swasembada pangan, ketergantungan pada impor, efisiensi pasca panen; kompetisi penggunaan pangan untuk manusia dan ternak (pangan versus pakan); kecenderungan produksi, ekspor, import, stok pangan maupun kualitas/ komposisi pangan yang tersedia. Dengan demikian, NBM yang disajikan secara lengkap, tepat waktu, dan berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya akan memberikan gambaran tentang perubahan situasi ketersediaan pangan per kapita di suatu negara/daerah pada suatu kurun waktu tertentu.

Penyusunan dan pengembangan NBM mencakup beberapa kegiatan yang didasarkan pada kaidah manajemen yaitu perencanaan yang diawali dari analisis data sampai dengan mengkomunikasikannya ke stakeholders sehingga diperoleh umpan balik untuk penyempurnaan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan upaya di atas, pada tahun anggaran 2024, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok telah melaksanakan kegiatan Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Depok.

## **B. Tujuan**

Secara umum kajian ini bertujuan untuk menghitung dan menganalisis situasi ketersediaan pangan wilayah Kota Depok berdasarkan Neraca Bahan Makanan (NBM) Tahun 2023 dengan pendekatan Pola Pangan Harapan. Secara lebih khusus kajian ini bertujuan untuk :

1. Menghitung situasi penyediaan dan menganalisis tingkat kemandirian pangan wilayah Kota Depok.
2. Menganalisis tingkat dan kualitas ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

## **C. Kegunaan**

1. Sebagai data rujukan tentang situasi ketersediaan pangan di tingkat wilayah, khususnya yang terkait dengan aspek produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor pangan serta berbagai bentuk penggunaan pangan di wilayah Kota Depok.
2. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam mengevaluasi keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan ketahanan pangan di Kota Depok, khususnya dalam hal tingkat ketersediaan pangan baik secara kuantitatif maupun kualitatif.
3. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan ketahanan pangan, khususnya dalam upaya menjamin ketersediaan pangan yang beragam, bergizi dan berimbang serta mencukupi kebutuhan seluruh penduduk di Wilayah Kota Depok.

## **II. LANDASAN KEBIJAKAN DAN TINJAUAN TEORITIS**

### **A. Landasan Hukum dan Kebijakan**

Perencanaan pembangunan tidak dapat terlepas dari aspek hukum dan kebijakan pembangunan. Aspek hukum menentukan hal-hal pokok seperti dasar hukum yang mengamanatkan suatu kegiatan perencanaan, aturan bagaimana dan oleh siapa perencanaan itu dilakukan atau proses administrasinya, bagaimana legalitas suatu proses pembangunan. Aspek kebijakan pembangunan yang erat kaitannya dengan birokrasi, sangat menentukan efektifitas dan efisiensi dari kegiatan perencanaan pembangunan. Bahkan lebih dari itu, kebijakan pembangunan sangat berpengaruh pada operasionalisasi dan keberhasilan implementasi suatu program pembangunan.

Beberapa produk hukum dan kebijakan yang menjadi dasar pertimbangan dalam kajian atau analisis terkait pembangunan ketahanan pangan di wilayah Kota Depok antara lain adalah:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5860);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
10. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 Tentang Dewan Ketahanan Pangan;
11. Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
12. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 Tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
13. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Tentang Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RAN-PG) 2017-2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2012 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Gerakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal;
16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/OT.140/12/2010 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.010/08/2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Bidang Pangan dan Bidang Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1329);

18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 Tentang Angka Kecukupan Gizi Yang Dianjurkan Untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
19. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Pola Pangan Harapan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 387);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 I - 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 25 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Jawa Barat Nomor 88);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 64);
22. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8);
23. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Depok Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 5);
24. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 9);
25. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2022 Nomor 09, Peraturan Daerah Kota Depok Noreg: 10/109/2022));
26. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan;
27. Peraturan Walikota Depok Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 67).

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Sementara pembangunan daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia. Dengan demikian perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Perencanaan pembangunan daerah dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang dilaksanakan untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang dilaksanakan selama 5 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk periode satu tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sedangkan RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD. RPJMD disusun dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sementara itu, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari RPJMD yang disusun selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP).

Renstra (Rencana Strategis) SKPD disusun berpedoman pada RPJMD. Renja (Rencana Kerja) SKPD merupakan penjabaran dari Renstra. Renja SKPD disusun berpedoman pada RKPD. RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD merupakan penjabaran dari Renja SKPD. RKA SKPD dikompilasi menjadi RAPBD. DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) SKPD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran setelah APBD disetujui. DPA disusun berdasarkan penjabaran APBD untuk setiap SKPD.

Pangan merupakan kebutuhan dasar hayati bagi seluruh umat manusia di muka bumi untuk dapat bertahan hidup. Oleh karena itu diperlukan strategi yang efisien dan effektif dalam pengelolaan pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi penduduk di suatu wilayah agar dapat hidup secara sehat dan produktif dalam rangka mewujudkan kehidupan yang berkualitas.

Terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi masyarakat, maka dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara

Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kebupaten/Kota dalam Pasal 7 huruf m dan Pasal 8, urusan Ketahanan Pangan merupakan urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar dalam pemenuhan kebutuhan hidup minimal.

Undang-Undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa: 1) Pasal 60 Ayat 1: Pemerintah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat dan mendukung hidup sehat, aktif, dan produktif; 2) Pasal 60 Ayat 2: Penganekaragaman konsumsi pangan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta sesuai dengan potensi dan kearifan lokal; Pasal 62 : Tercapainya penganekaragaman konsumsi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diukur melalui pencapaian nilai komposisi pola pangan dan gizi seimbang.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam Lampiran menyatakan bahwa penyelenggaraan ketahanan pangan di kabupaten/kota mencakup 4 urusan dan 9 sub-urusan, yaitu: 1), Penyelenggaraan pangan berdasarkan kedaulatan dan kemandirian (urusan daerah kabupaten/kota adalah penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan pada berbagai sektor sesuai kewenangan daerah kabupaten/kota); 2). Penyelenggaraan ketahanan pangan (urusan daerah kabupaten/kota adalah a) penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya sesuai kebutuhan daerah kabupaten/kota dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan, b) pengelolaan cadangan pangan kabupaten/kota, c) penentuan harga minimum daerah untuk pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, d) pelaksanaan pencapaian target konsumsi pangan perkapita/tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi); 3). Penanganan kerawanan pangan (urusan daerah kabupaten/kota adalah: a) penyusunan peta kerentanan dan ketahanan pangan kecamatan, b) penanganan kerawanan pangan kabupaten/kota, c) pengadaan, pengelolaan dan penyaluran cadangan pangan pada kerawanan pangan yang mencakup dalam daerah kabupaten/kota); (4) Keamanan pangan (urusan daerah kabupaten/kota adalah pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar).

Mengacu pada uraian tersebut, maka panganekaragaman konsumsi pangan termasuk kedalam salah satu jenis pelayanan dasar pembangunan bidang ketahanan. Oleh karena itu,

perkembangan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan penduduk merupakan salah satu indikator kinerja bidang ketahanan pangan, sekaligus mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bidang ketahanan pangan oleh pemerintah kabupaten/kota. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi mengatur secara lebih detail terkait dengan hal tersebut yang antara lain menjelaskan bahwa:

- 1) Pasal 25 : Penganekaragaman pangan merupakan upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang beragam dan berbasis pada potensi sumber daya lokal untuk:
  - a. memenuhi pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman;
  - b. mengembangkan usaha Pangan; dan/atau
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 2) Pasal 26 Ayat 1: Penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 dilakukan melalui:
  - a. penetapan kaidah penganekaragaman pangan;
  - b. pengoptimalan pangan lokal;
  - c. dan seterusnya.
- 3) Pasal 27 Ayat 1 : Penetapan kaidah Penganekaragaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a dilakukan dengan berpedoman pada:
  - a. prinsip gizi seimbang;
  - b. berbasis sumber daya dan kearifan lokal;
  - c. ramah lingkungan; dan
  - d. aman.
- 4) Pasal 27 Ayat 2: Prinsip gizi seimbang sebagaimana dimaksud pada ayat huruf a diukur dengan Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya.
- 5) Pasal 27 Ayat 3: Ketentuan mengenai Pola Pangan Harapan dan/atau ukuran lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga Pemerintah.

## B. Landasan Teoritis dan Metodologis

Neraca Bahan Makanan (NBM) adalah penyajian data dalam bentuk tabel yang dapat menggambarkan situasi dan kondisi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di suatu wilayah (negara/provinsi/kabupaten) dalam suatu kurun waktu tertentu. NBM menyajikan angka rata-rata jumlah pangan yang tersedia di tingkat pedagang eceran atau rumah tangga konsumen untuk konsumsi penduduk per kapita (kg/kapita/tahun atau gram/kapita/hari atau zat gizi tertentu/kapita/hari).

NBM merupakan perangkat statistik untuk menyajikan informasi mengenai penyediaan/pengadaan (supply) dan penggunaan jenis pangan di suatu wilayah. Penyediaan pangan di dalam negeri/ wilayah berasal dari produksi dalam negeri dikurangi dengan perubahan stok, ditambah impor dan dikurangi dengan ekspor. Penggunaan pangan terdiri atas pemakaian untuk pakan, bibit, industri makanan dan non makanan, tercecer dan ketersediaan untuk dikonsumsi penduduk. Dalam format neraca maka penyediaan pangan dalam negeri/wilayah harus sama dengan jumlah pemakaian pangan dalam negeri/wilayah.

Tujuan penyusunan NBM adalah untuk mengetahui gambaran pengadaan (produksi, impor, stok/cadangan) dan penggunaan serta ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk maupun perubahannya di suatu wilayah pada waktu tertentu. Selain itu juga untuk memperoleh gambaran detail tentang tingkat ketersediaan, swasembada, ketergantungan pada impor, efisiensi pasca panen; kompetisi manusia – ternak (pangan versus pakan); kecenderungan produksi, ekspor, impor, stok pangan maupun kualitas/komposisi pangan yang tersedia. Dengan demikian, NBM yang disajikan secara lengkap, tepat waktu, dan berurutan dari suatu periode ke periode berikutnya akan memberikan gambaran tentang situasi penyediaan pangan per kapita suatu negara/daerah pada suatu kurun waktu tertentu. Hal tersebut diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil keputusan dalam menetapkan kebijakan yang harus ditempuh, memantapkan kebijakan pangan secara menyeluruh, maupun untuk menyusun perencanaan Program perbaikan pangan dan gizi.

Pola Pangan harapan atau *Desirable Dietary Pattern* adalah susunan beragam pangan yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama (baik secara absolut maupun relatif) dari suatu pola ketersediaan dan atau konsumsi pangan. FAO-RAPA (1989) mendefinisikan PPH sebagai “komposisi kelompok pangan utama yang bila dikonsumsi dapat memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya”. Dengan demikian, PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi baik dalam jumlah, maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Dengan pendekatan PPH ini mutu konsumsi pangan penduduk dapat dilihat dari skor pangan (dietary score) dan dikenal sebagai Skor PPH. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam dan seimbang gizinya.

Standar perhitungan skor PPH menurut Deptan (2001) merupakan penyempurnaan dari pola pangan harapan berdasarkan anjuran FAO-RAPA (1989) dengan menerapan sistem skor untuk penilaian konsumsi pangan berdasarkan Guthrie et al (1981), yaitu setiap kelompok pangan utama (tiga kelompok pangan utama) diberikan skor maksimum yang relatif sama, yaitu 33,3 bagi setiap kelompok pangan utama (berasal dari 100 dibagi 3). Kelompok pangan tersebut adalah (a) pangan sumber karbohidrat dan energi (serealia, umbi-

umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak dan gula) dengan kontribusi energi 74%; (b) pangan sumber protein/lauk-pauk (kacang-kacangan dan pangan hewani) dengan kontribusi energi 17%; (c) pangan sumber vitamin dan mineral (sayur dan buah) dengan kontribusi energi 6% dan (d) pangan lainnya (aneka minuman dan bumbu) dengan kontribusi energi 3%. Rating 0,5 diperoleh dari nilai 33,3 dibagi 74; rating 2,0 diperoleh dari nilai 33,3 dibagi 17; dan rating 5,0 diperoleh dari nilai 33,3 dibagi 6. Masing-masing hasil dibulatkan untuk kembali mendapatkan total skor PPH = 100. Tabel II.B.2 menyajikan Standar Perhitungan Skor PPH Ideal Nasional dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan.

Tabel II.B.2. Susunan PPH Ideal dan Estimasi Berat Konsumsi Pangan Berdasarkan Standar Ideal Nasional

No.	Kelompok Pangan	Kecukupan Energi Per Kapita		Standar Perhitungan PPH		Estimasi Berat (gr/kap/hari)
		kkal/hari	%AKE	Bobot	Skor	
1.	Padi-padian	1.050	50	0,5	25,0	289
2.	Umbi-umbian	126	6	0,5	2,5	95
3.	Pangan Hewani	252	12	2,0	24,0	147
4.	Minyak dan lemak	210	10	0,5	5,0	26
5.	Buah/biji berminyak	63	3	0,5	1,0	11
6.	Kacang-kacangan	105	5	2,0	10,0	37
7.	Gula	105	5	0,5	2,5	32
8.	Sayur dan Buah	126	6	5,0	30,0	242
9.	Lain-lain	63	3	0,0	0,0	16
		2.100	100		100,0	

Keterangan : Berdasarkan Standar PPH Ideal Nasional dan AKE 2.100 kkal/kapita/hari

Penyempurnaan Standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal di Indonesia yang disajikan pada Tabel II.B.2. mengacu pada rumusan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel II.B.1. Beberapa pertimbangan pokok yang digunakan dalam perumusan, antara lain: (1) Angka Kecukupan Energi (AKE) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) Tahun 1998 sebesar 2.000 kkal/kapita/hari atau WNPG Tahun 2012 sebesar 2.150 kkal/kapita/hari atau WNPG Tahun 2018 sebesar 2.100 kkal/kapita/hari; (2) Perubahan AKE sebaiknya menunggu berakhirnya periode RPJM berjalan dan digunakan saat menetapkan sasaran kinerja periode RPJM berikutnya; (3) Persentase energi untuk perhitungan skor PPH dihitung terhadap AKE; (4) Bobot disempurnakan sesuai teori rating; (5) Skor maksimum PPH adalah 100; (6) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan Pedoman Umum Gizi Seimbang (PUGS); (7) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; (8) Peran makanan lainnya

terutama bumbu dan minuman lainnya tidak diabaikan; (9) Untuk beberapa daerah yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah serta preferensi pangan masyarakat yang dianggap spesifik diperlukan penyesuaian.

PPH berguna sebagai instrumen sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan, berupa jumlah dan komposisi pangan menurut kelompok pangan secara agregat. Disamping itu juga berguna sebagai basis untuk perhitungan skor PPH yang digunakan sebagai indikator mutu gizi dan keragaman ketersediaan maupun konsumsi pangan. PPH juga berguna untuk perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan. Dengan pendekatan PPH, perencanaan konsumsi dan ketersediaan pangan penduduk pada tahun-tahun mendatang diharapkan dapat mencapai ideal, yaitu tidak hanya memenuhi kecukupan gizi (nutritional adequacy) akan tetapi sekaligus juga mempertimbangkan keseimbangan gizi (nutritional balance) yang didukung oleh cita rasa (palatability), daya cerna (digestability), daya terima masyarakat (acceptability), kuantitas dan kemampuan daya beli (affordability).

### **III. DESAIN DAN METODE ANALISIS**

#### **A. Desain dan Cakupan Analisis**

Desain yang digunakan dalam kajian ini adalah *descriptive quantitative and explorative study* dengan menggali sebanyak-banyaknya data dan informasi untuk merumuskan karakteristik khas dari subjek yang dikaji secara deskriptif. Fokus utama dalam kajian ini adalah analisis situasi penyediaan dan ketersediaan pangan wilayah serta kualitas ketersediaan pangan yang tersedia untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok yang didasarkan pada hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.

Kegiatan Penyusunan Neraca Bahan Makanan Kota Depok dilaksanakan selama 3 (tiga bulan effektif) dari bulan Juli sampai dengan September 2024. Adapun lingkup kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan desain analisis yang dikembangkan adalah sebagai berikut: inventarisasi bahan pustaka, inventarisasi data sekunder, pengolahan dan analisis data, serta penyusunan laporan.

#### **B. Jenis dan Sumber Data**

Perhitungan dan analisis ketersediaan pangan berdasarkan NBM Kota Depok sepenuhnya menggunakan data sekunder yang diperoleh dari dinas/intansi terkait di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Depok, khususnya : Badan Pusat Statistik; Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan, dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan; serta intansi-intansi terkait lainnya. Jenis data dasar yang dikumpulkan dan digunakan untuk menghitung NBM mencakup data jumlah produksi, perubahan stok, impor, dan ekspor pangan selama satu tahun. **Data produksi pangan** mencakup berbagai komoditas pertanian, peternakan dan perikanan yang telah dihasil dari hasil kegiatan budidaya yang dilaksanakan di wilayah Kota Depok.

**Data perubahan stok pangan** adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun analisis, sehingga bisa bernilai negatif (berarti terdapat pengurangan stok akibat pelepasan stok ke pasar, sehingga penyediaan pangan di pasar bertambah) atau positif (berarti terdapat penambahan stok, sehingga penyediaan pangan di pasar berkurang). Data perubahan stok, khususnya untuk komoditas beras, terigu, gula pasir, dan kacang-kacangan diperoleh dari Bulog Divisi Regional Bogor.

**Data impor pangan** adalah data sejumlah bahan pangan baik yang sudah maupun belum mengalami pengolahan, yang didatangkan dari luar wilayah baik dari luar negeri maupun luar Kota ke dalam wilayah Kota Depok. **Data ekspor pangan** adalah data sejumlah bahan pangan baik yang sudah maupun belum mengalami pengolahan, yang dikeluarkan dari wilayah wilayah Kota Depok.

Tabel III.B.1. Jenis dan Sumber Data Pokok Penyusunan dan Analisis Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Data	Parameter Pokok	Tahun Data	Sumber Data	
				Publikasi	Intansi
1	Data Penyediaan Pangan	Produksi, Perubahan Stok, Impor, dan Ekspor per komoditas pangan	2023	Kota Depok Dalam Angka Tahun 2024 Laporan Kinerja Pemerintah Kota Depok Tahun 2023	Badan Pusat Statistik, Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok
2	Konsumsi Pangan Penduduk	Rata-rata kuantitas konsumsi pangan penduduk per komoditas dalam satuan URT per kapita/minggu	2023	Data Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional	Badan Pusat Statistik Badan Pangan Nasional
3	Karakteristik Geografi, Demografi, Agroekologi Wilayah	Luas Wilayah Jumlah dan Pertumbuhan Penduduk Tatar Guna Lahan	2023	Kota Depok Dalam Angka Tahun 2024	Badan Pusat Statistik

Sementara itu, persyaratan data/informasi lain untuk penyusunan NBM yang harus dipenuhi meliputi persyaratan tentang jenis bahan makanan, data penduduk, besaran dan angka konversi, komposisi gizi bahan makanan, serta cara penulisan dan pembulatan angka. Berikut ini adalah uraian tentang berbagai persyaratan penyusunan NBM.

**Jenis bahan makanan** yang dimaksud di sini adalah jenis bahan makanan yang lazim atau umum dikonsumsi oleh masyarakat suatu negara/daerah yang data produksinya tersedia secara kontinyu dan resmi.

**Data penduduk** yang digunakan adalah data penduduk pertengahan tahun yang bersumber dari BPS dan Kantor Statistik. Data penduduk tersebut termasuk penduduk asing yang bermukim di Indonesia minimal selama enam bulan. Penduduk pertengahan tahun yang bersangkutan diperoleh dengan cara menjumlahkan penduduk tahun yang bersangkutan dengan penduduk tahun sebelumnya, dibagi dua. Hasil Sensus Penduduk 2010 dan publikasi proyeksi penduduk Indonesia menurut kabupaten tahun 2023 oleh BPS dapat digunakan sebagai sumber data penduduk.

**Besaran dan angka konversi** yang digunakan adalah besaran dan angka konversi yang ditetapkan oleh Tim NBM Nasional. Untuk penyusunan NBM wilayah/daerah, sepanjang besaran dan angka konversi tersedia di daerah dapat digunakan angka tersebut dengan menyebut sumbernya. Bila belum tersedia digunakan besaran dan angka konversi nasional. Bila angka konversi yang diperlukan belum tersedia, maka angka-angka tersebut diestimasikan berdasarkan kesepakatan. Faktor konversi harus memenuhi persyaratan: 1) angka-angka harus tunggal; 2) bukan angka kisaran; 3) tersedia untuk setiap jenis bahan pangan dan produksi turunannya; 4) faktor konversi yang digunakan harus dilampirkan dalam NBM yang disusun. Faktor konversi untuk penyusunan NBM mencakup produksi dan penggunaan pangan. Faktor konversi untuk menghitung produksi menyangkut semua tahapan mulai dari tahap memproduksi, proses pengolahan hingga siap untuk dibeli konsumen. Misalnya : gabah kering panen ----- gabah kering giling----- beras, yaitu untuk mengisi kolom (2) dan (3) Faktor konversi untuk penggunaan pangan menyangkut tingkat pemanfaatan bahan makanan untuk bahan baku industri, kebutuhan pakan, bibit/benih serta tercecer/rusak/waste. yaitu untuk mengisi kolom (9) sampai dengan kolom (13).

**Komposisi gizi bahan makanan** yang digunakan adalah yang bersumber dari buku Daftar Komposisi Bahan Makanan (DKBM), publikasi Departemen Kesehatan, dan dari sumber lain yang resmi yaitu: “Food Composition Table for Use In East Asia” dan “Food Composition Table for International Use” Publikasi FAO. Komposisi gizi tersebut adalah besarnya nilai kandungan gizi dari bagian yang dapat dimakan. Tabel 5 merupakan komposisi kandungan gizi beberapa komoditas pangan.

## C. Pengolahan dan Analisis Data

### 1. Cara Penyusunan NBM

Berbagai teknik perhitungan serta faktor konversi yang digunakan dalam menyusun NBM Kota Depok mengacu pada Buku Pedoman Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM) yang disusun oleh Badan Ketahanan Pangan (BKP) Departemen Pertanian (2005). Penyusunan NBM dilakukan dengan menggunakan Aplikasi Analisis Neraca Bahan Makanan yang dikembangkan atas kerjasama tim Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian dan tim Depaetemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia – Institut Pertanian Bogor.

Pengisian data input NBM dilakukan secara berurut kolom demi kolom yang terdiri dari 19 kolom. Kolom-kolom tersebut adalah sebagai berikut: 1) Jenis Bahan Makanan; 2) Produksi (Masukan); 3) Produksi (Keluaran); 4) Perubahan Stok; 5) Impor; 6) Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor; 7) Ekspor; 8) Penyediaan Dalam Negeri; 9) Pakan; 10) Bibit/ Benih; 11) Diolah untuk Makanan; 12) Diolah untuk Bukan Makanan; 13) Tercecer; 14 s/d 16) Jumlah Bahan Makanan yang Tersedia untuk Konsumsi Penduduk: 14) (ton);

15) (kg/kapita/tahun); 16) (gram/kapita/hari); 17) s/d 19) Jumlah energi dan Zat Gizi yang Tersedia untuk Konsumsi Penduduk: 17) Energi (Kal/kapita/hari); 18) Protein (gram/kapita/hari); 19) Lemak (gram/kapita/hari). Ketersediaan pangan untuk dikonsumsi (ton/th) diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut :

$$TD = O - S + M - X - (P+B+I+C)$$

Keterangan :

TD = ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduk  
O = Produksi (masukan/keluaran)  
S = Perubahan stok  
M = Impor  
X = Ekspor  
P = Pakan  
B = Bibit  
I = Industri (makanan dan bukan makanan)  
C = Tercecer

#### ***Kolom (1). Jenis Bahan Makanan***

Bahan makanan yang dicantumkan dalam kolom ini adalah semua jenis bahan makanan baik nabati maupun hewani yang lazim/umum tersedia untuk dikonsumsi oleh masyarakat, dan dikelompokkan menurut jenisnya yang diikuti prosesnya dari produksi sampai dengan dapat dipasarkan/dikonsumsi dalam bentuk belum berubah atau bentuk lain yang berbeda sama sekali setelah melalui proses pengolahan. Pengelompokan bahan pangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. **Padi-padian**, terdiri atas : gandum, padi, jagung dan sorgum (cettel), serta produksi turunannya.
2. **Makanan berpati**, adalah bahan makanan yang mengandung pati yang berasal dari akar/umbi dan lain-lain bagian tanaman yang merupakan bahan makanan pokok lainnya. Yang termasuk dalam kelompok ini adalah ubi kayu, ubi jalar, dan sagu, serta produksi turunannya. Contoh : gapple/chips dan tapioka/pellet adalah turunan dari ubi kayu.
3. **Gula**, terdiri atas : gula pasir dan gula merah (gula mangkok, gula aren, gula semut, dan lain-lain), baik yang merupakan hasil olahan pabrik maupun rumah tangga.
4. **Buah/biji berminyak**, adalah kelompok bahan makanan yang mengandung minyak, yang berasal dari buah dan biji-bijian. Terdiri atas : kacang hijau, kelapa, kacang tanah, kacang kedele, kacang mete, kemiri, kacang bogor dan lain-lain yang sejenis. Sebagian dari komoditas ini, khususnya kelapa, diolah menjadi kopra yang selanjutnya dijadikan minyak goreng, sehingga produk turunannya tercantum dalam kelompok minyak dan lemak.

5. **Buah-buahan**, adalah sumber vitamin dan mineral dari bagian tanaman yang berupa buah. Ummnya merupakan produksi tanaman tahunan yang dapat dikonsumsi tanpa dimasak.
6. **Sayuran**, adalah sumber vitamin dan mineral yang dikonsumsi dari bagian tanaman yang berupa daun, bunga, buah, batang atau umbi. Tanaman tersebut pada umumnya berumur kurang dari satu tahun.
7. **Daging**, adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih atau dibunuh dan lazim dimakan manusia, kecuali yang telah diawetkan dengan cara lain selain pendinginan.
8. **Telur**, adalah telur ayam buras, telur ayam ras, dan telur itik.
9. **Susu**, adalah cairan yang diperoleh dari ambing ternak perah sehat, dengan cara pemerasan yang benar, terus-menerus dan tidak dikurangi sesuatu dan/atau ditambahkan ke dalamnya sesuatu bahan lain.
10. **Ikan**, adalah komoditas yang berupa binatang air dan biota perairan lainnya. Yang dimaksud komoditas ikan disini adalah yang berasal dari kegiatan penangkapan di laut maupun di perairan umum (waduk, sungai dan rawa) dan hasil dari kegiatan budidaya (tambak, kolam, keramba dan sawah) yang dapat diolah menjadi bahan makanan yang lazim/umum dikonsumsi masyarakat.
11. **Minyak dan Lemak**, adalah bahan makanan yang berasal dari nabati, seperti: minyak kelapa, minyak sawit, minyak kacang tanah, minyak kedele, dan minyak jagung, serta yang berasal dari hewani yaitu minyak ikan. Sedangkan lemak umumnya berasal dari hewani, seperti: lemak sapi, lemak kerbau, lemak kambing/domba, lemak babi, dan lain-lain.

#### **Kolom (2) dan (3). Produksi**

Produksi adalah jumlah keseluruhan hasil masing-masing bahan makanan yang dihasilkan dari sektor pertanian (Tanaman Pangan, Peternakan, Perikanan, dan Perkebunan), yang belum mengalami proses pengolahan maupun yang sudah mengalami proses pengolahan. Produksi dikategorikan menjadi 2 kategori sebagai berikut :

1. **Kolom (2) : Masukan (Input)** Masukan adalah produksi yang masih dalam bentuk asli maupun dalam bentuk hasil olahan yang akan mengalami proses pengolahan lebih lanjut. Sebagai contoh, pada komoditas ternak masukan (input) berupa karkas.
2. **Kolom (3) : Keluaran (Output)** adalah produksi dari hasil keseluruhan atau sebagai hasil turunan yang diperoleh dari kegiatan berproduksi; atau hasil utama yang langsung diperoleh dari kegiatan berproduksi yang belum mengalami perubahan. Besarnya output sebagai hasil dari input sangat tergantung pada besarnya derajat ekstraksi dan faktor

konversi (Tabel 3, 4, 5). Sebagai contoh, pada komoditas ternak keluaran (output) berupa daging.

Pada kelompok buah/biji berminyak, kacang tanah lepas kulit/biji kacang tanah dan kelapa daging masing-masing mempunyai produksi turunan dalam bentuk minyak goreng, yang termasuk dalam kelompok minyak dan lemak. Pada kelompok daging, produksi turunan karkas adalah antara lain dalam bentuk lemak. Dalam perhitungan, lemak ini harus dimasukkan dalam kelompok minyak dan lemak.

#### **Kolom (4). Stok dan Perubahan Stok**

**Stok** adalah sejumlah bahan makanan yang disimpan/dikuasai oleh Pemerintah atau Swasta yang dimaksudkan sebagai cadangan dan akan digunakan apabila sewaktu-waktu diperlukan. Data stok yang digunakan adalah data stok awal dan akhir tahun.

**Perubahan Stok** adalah selisih antara stok akhir tahun dengan stok awal tahun. Perubahan stok ini hasilnya bias negatif (-) dan bisa positif (+). Negatif (-) berarti ada penurunan stok akibat pelepasan stok ke pasar sehingga komoditas yang beredar di pasar bertambah. Positif (+) berarti ada peningkatan stok yang berasal dari komoditas yang beredar di pasar sehingga komoditas yang beredar di pasar menjadi menurun.

#### **Kolom (5). Impor**

**Impor** adalah sejumlah bahan makanan baik yang belum maupun yang sudah mengalami pengolahan, yang didatangkan/dimasukkan dari luar negeri ke dalam wilayah RI, dengan tujuan untuk diperdagangkan, diedarkan, atau disimpan. Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi, yang termasuk impor adalah :

- a. Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari luar wilayah RI langsung ke dalam wilayah daerah yang bersangkutan, yang dalam hal ini perlu memperhatikan kode harmonized system.
- b. Bahan makanan yang didatangkan/dimasukkan dari wilayah daerah administrative lain ke dalam wilayah daerah administrative yang bersangkutan dalam arti lain perdagangan antar pulau atau antar provinsi.

Estimasi jumlah impor pangan diperoleh dari selisih antara data konsumsi pangan dengan data produksi pangan di wilayah Kota Depok. Data konsumsi per jenis pangan didasarkan pada rata-rata konsumsi pangan penduduk per kapita/hari sesuai dengan hasil Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Kota Depok tahun 2023 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Data total konsumsi pangan wilayah dalam setahun diperoleh dari hasil perkalian antara rata-rata konsumsi pangan dengan jumlah hari dalam setahun dan jumlah penduduk di Kota Depok pada tahun 2023. Jika selisih antara pangan yang

dikonsumsi dan diproduksi bernilai positif maka pangan tersebut berasal dari impor dari wilayah lain. Namun jika selisihnya bernilai negatif maka ini menunjukkan bahwa nilai produksi lebih besar dibandingkan dengan konsumsi. Hal ini tidak dapat diestimasikan sebagai ekspor, karena terdapat kemungkinan pangan masih beredar dalam pasar dalam wilayah Kota Depok. Jika tidak tersedia data produksi pangan, maka jumlah konsumsi pangan tersebut merupakan satu-satunya sumber pengadaan pangan yang berasal dari impor. Estimasi jumlah impor untuk beberapa pangan strategis dihitung berdasarkan pendekatan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan data rata-rata konsumsi pangan (Gram/kapita/hari) yang diperoleh dari hasil Susenas dikalikan dengan 110% (merupakan perbedaan angka kecukupan energi di tingkat konsumsi dan ketersediaan pangan) dapat diperoleh estimasi jumlah rata-rata kebutuhan pangan untuk konsumsi oleh penduduk di wilayah Kota Depok.
- b. Selanjutnya dihitung total jumlah ketersediaan pangan wilayah (ton/tahu) dengan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\text{Kebutuhan pangan (Gram/kapita/hari)} \times \text{Jumlah Penduduk} \times 365}{1.000.000}$$

- c. Angka hasil perhitungan tersebut selanjutnya dijadikan sebagai data estimasi jumlah impor pangan di kolom 5 pada Neraca Bahan Makanan setelah ditambah dengan sejumlah pangan berdasarkan proporsi penggunaan pangan untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industri makanan dan bukan makanan, serta tercecer.

#### ***Kolom (6). Penyediaan Dalam Negeri Sebelum Ekspor***

Penyediaan dalam negeri sebelum ekspor adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor.

#### ***Kolom (7). Ekspor***

Untuk penghitungan NBM Regional/Provinsi yang termasuk ekspor adalah :

- a. Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administratif, langsung ke luar wilayah negara RI yang dalam hal ini perlu memperhatikan kode harmony system (HS).
- b. Bahan makanan yang dikeluarkan dari suatu wilayah daerah administratif lain yang berarti perdagangan antar pulau atau antar provinsi.

#### ***Kolom (8). Penyediaan Dalam Negeri***

Penyediaan dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang berasal dari produksi (keluaran) dikurangi perubahan stok ditambah impor dikurangi ekspor.

### **Kolom (9 - 13). Pemakaian Dalam Negeri**

Pemakaian dalam negeri adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan di dalam daerah untuk pakan, bibit/benih, diolah untuk industri makanan dan bukan makanan, yang tercecer, dan yang tersedia untuk dimakan. Untuk menghitung jumlah pemakaian pangan di dalam negeri digunakan angka konversi dengan mengacu pada angka konversi nasional berdasarkan panduan penyusunan NBM yang disesuaikan dengan kondisi potensi wilayah Kota Depok.

- a. **Kolom (9) : Pakan** adalah sejumlah bahan makanan yang langsung diberikan kepada ternak peliharaan baik ternak besar, ternak kecil, unggas, maupun ikan.
- b. **Kolom (10) : Bibit/Benih** adalah sejumlah bahan makanan yang digunakan untuk keperluan reproduksi.
- c. **Kolom (11) : Diolah untuk Makanan** adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut melalui industri makanan dan hasilnya dimanfaatkan untuk makanan manusia dalam bentuk lain.
- d. **Kolom (12) : Diolah untuk Bukan Makanan** adalah sejumlah bahan makanan yang masih mengalami proses pengolahan lebih lanjut dan dimanfaatkan untuk kebutuhan industri bukan untuk makanan manusia, termasuk untuk industri pakan ternak/ikan.
- e. **Kolom (13) : Tercecer** adalah sejumlah bahan makanan yang hilang atau rusak, sehingga tidak dapat dimakan oleh manusia, yang terjadi secara tidak disengaja sejak bahan makanan tersebut diproduksi hingga tersedia untuk konsumen.
- f. **Kolom (14) : Bahan Makanan** adalah sejumlah jenis bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk suatu Negara atau daerah, dalam suatu kurun waktu tertentu.

### **Kolom (15 - 19). Ketersediaan Per Kapita**

Ketersediaan per kapita adalah sejumlah bahan makanan yang tersedia untuk dikonsumsi setiap penduduk suatu negara/daerah dalam suatu kurun waktu tertentu, baik dalam bentuk natural (Kolom 15 : kg/kapita/tahun; kolom 16 : Gram/kapita/hari) maupun bentuk unsur gizinya. Untuk menghitung ketersediaan energi dan zat gizi (protein dan lemak) setiap orang setiap hari digunakan Daftar Komposisi Bahan Makanan. Unsur gizi utama tersebut adalah sebagai berikut :

- a. **Kolom (17) : Energi** adalah sejumlah kalori hasil pembakaran karbohidrat yang berasal dari berbagai jenis bahan makanan. Energi ini sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk kegiatan tubuh seluruhnya.

- b. **Kolom (18) : Protein** adalah suatu persenyawaan yang mengandung unsur “N”, yang sangat dibutuhkan tubuh untuk pertumbuhan serta penggantian jaringan-jaringan yang rusak/aus.
- c. **Kolom (19) : Lemak** adalah salah satu unsur zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh sebagai tempat penyimpanan energi, protein, dan vitamin.

## 2. Analisis Kemandirian Pangan

Salah satu ukuran tingkat kemandirian pangan wilayah adalah dengan menelaah tingkat swasembada pangan yang diukur berdasarkan seberapa besar penyediaan pangan dalam suatu wilayah dapat dipenuhi dari hasil produksi di wilayah sendiri. Disisi lain dapat pula dikaji dari sudut Tingkat ketergantungan yang diukur berdasarkan besarnya penyediaan pangan dalam suatu wilayah yang harus dipenuhi melalui impor pangan dari luar daerah.

Secara sederhana tingkat ketergantungan wilayah diukur berdasarkan tingkat atau perbandingan yang dinyatakan dalam persen antara jumlah impor dengan total penyediaan pangan dalam wilayah yang merupakan hasil perhitungan jumlah produksi ditambah perubahan stok dan impor dikurangi ekspor. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jumlah impor pangan akan melebihi jumlah penyediaan dalam wilayah dengan kata lain Tingkat ketergantungan terhadap impor lebih dari 100 persen.

## 3. Analisis Ketersediaan Pangan

Situasi ketersediaan pangan di Kota Depok dapat dianalisis dari berbagai segi yaitu (1) Aspek kuantitas pangan dan (2) Aspek kualitas pangan. Analisis aspek kuantitas ketersediaan pangan dilihat dari besarnya jumlah pangan yang tersedia di Kota Depok dan dinyatakan dalam satuan volume (ribu ton), kg/kapita/tahun atau gram/kapita/hari. Sedangkan analisis ketersediaan pangan secara kualitatif dapat dilakukan dengan dua pendekatan yaitu aspek gizi dan keragaman. Aspek gizi dapat dilihat dari besarnya energi dan angka kecukupan gizi, sedangkan aspek keragaman dapat dilihat dari pola ketersediaan pangan (kontribusi energi menurut kelompok komoditas pangan), dan skor mutu pangan dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

Penyempurnaan standar Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Ideal untuk tingkat ketersediaan di Indonesia saat ini mengacu pada rumusan Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian tahun 2015 sebagaimana disajikan pada Tabel III.C.1. Beberapa pertimbangan pokok yang digunakan dalam analisis, antara lain: (1) Angka Kecukupan Gizi (AKG) berdasarkan Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNKPG) Tahun 1998 sebesar 2200 kkal/kapita/hari atau WNKPG Tahun 2012 sebesar 2400 kkal/kapita/hari; (2) Perubahan standar AKG dilakukan diawal periode RPJM; (3) Persentase

energi untuk perhitungan skor PPH dihitung terhadap AKG; (4) Bobot disempurnakan sesuai teori rating; (5) Skor maksimum PPH adalah 100; (6) Peran pangan hewani, gula, serta sayur dan buah disesuaikan dengan PUGS; (7) Peran umbi-umbian ditingkatkan sejalan dengan kebijakan diversifikasi pangan pokok dan pengembangan pangan lokal; (8) Peran makanan lainnya terutama bumbu dan minuman lainnya tidak diabaikan; (9) Untuk Beberapa daerah yang memiliki karakteristik dan potensi wilayah serta preferensi pangan masyarakat yang dianggap spesifik diperlukan penyesuaian.

Tabel III.C.1. Susunan Pola Pangan Harapan (PPH) Nasional Untuk Tingkat Ketersediaan

No	Kelompok Pangan	Berat (gram/kapita/hr)	Energi (Kkal/kapita/hr)	% AKE	Bobot	Skor PPH
1	Padi-padian	330	1.200	50,0	0,5	25,0
2	Umbi-umbian	108	144	6,0	0,5	2,5
3	Pangan Hewani	168	288	12,0	2,0	24,0
4	Minyak dan Lemak	30	240	10,0	0,5	5,0
5	Buah/biji berminyak	12	72	3,0	0,5	1,0
6	Kacang-kacangan	42	120	5,0	2,0	10,0
7	Gula	36	120	5,0	0,5	2,5
8	Sayur dan Buah	276	144	6,0	5,0	30,0
9	Lain-lain	18	72	3,0	0,0	0,0
	Jumlah		2.400	100,0		100,0

Keterangan : Berdasarkan Standar PPH Ideal Nasional dan AKE 2.400 kkal/kapita/hari

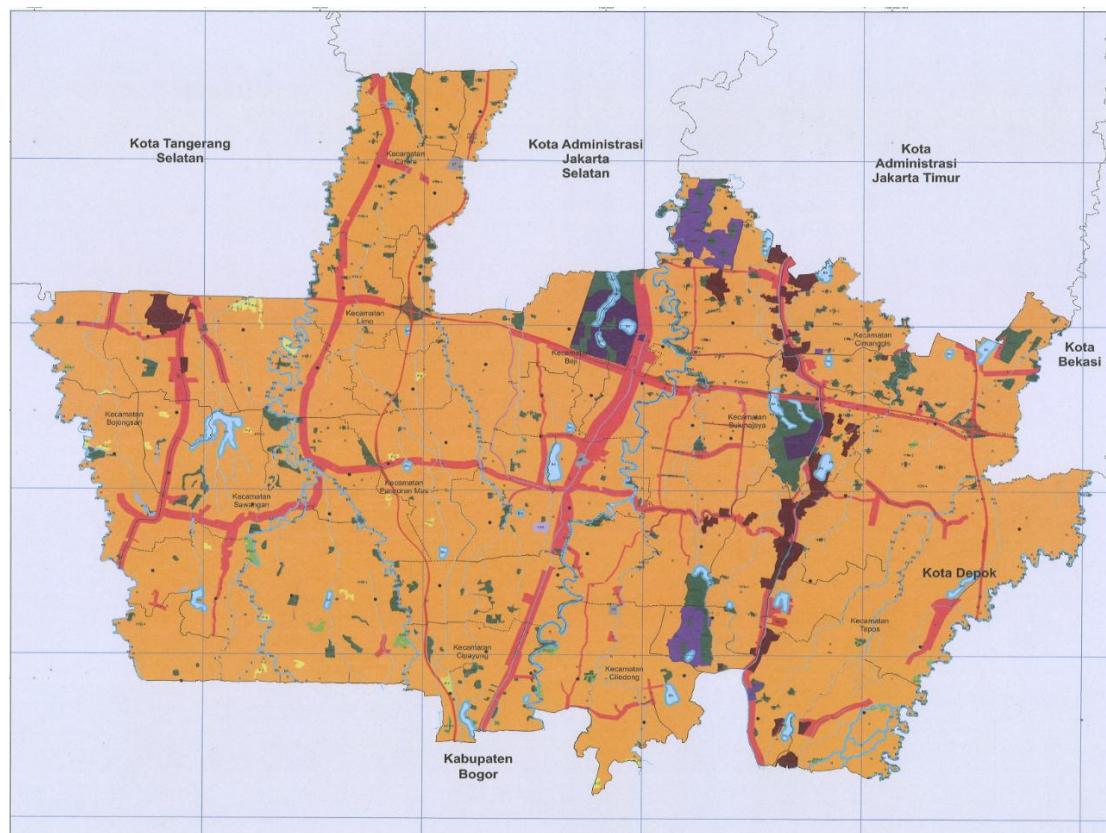
## IV. KEADAAN UMUM WILAYAH

### A. Geografis

Secara geografis Kota Depok terletak pada koordinat  $6^{\circ}18'30''$  -  $6^{\circ}28'00''$  Lintang Selatan dan  $106^{\circ}42'30''$  -  $106^{\circ}55'30''$  Bujur Timur. Bentang alam wilayah Kota Depok dari Selatan ke Utara merupakan daerah dataran rendah dan perbukitan bergelombang lemah dengan sungai-sungai yang termasuk ke dalam dua Satuan Wilayah Sungai (SWS) Besar, yaitu Sungai Ciliwung dan Cisadane.

Batas-batas wilayah Kota Depok meliputi:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat dan Kota Tangerang Selatan Provinsi Banten.



Gambar IV.A.1. Peta Wilayah Administratif Kota Depok

Berdasarkan posisi geografinya, Kota Depok berbatasan dengan Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, Kabupaten Bogor dan Kota Bekasi. Oleh karena letaknya yang berbatasan langsung dengan ibukota membuat Kota Depok menjadi tempat strategis sebagai pemukiman favorit bagi kaum komuter. Kota Depok mempunyai luas wilayah sekitar

200,29 km<sup>2</sup>, dengan kondisi geografinya dialiri oleh sungai-sungai besar dan mata air yang timbul menjadi air permukaan berupa situ-situ.

Pada tahun 1999, wilayah Kota Depok terdiri dari enam wilayah Kecamatan, berdasarkan Undang Undang Nomor 15 tahun 1999 yang mencakup 63 kelurahan. Kecamatan dengan luas wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos (32,33 km<sup>2</sup>), sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Cinere (10,46 km<sup>2</sup>). Saat ini Kota depok terdiri dari 11 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sawangan, Kecamatan Bojongsari, Kecamatan Pancoran Mas, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Sukmajaya, Kecamatan Cilodong, Kecamatan Cimanggis, Kecamatan Tapos, Kecamatan Beji, Kecamatan Limo, dan Kecamatan Cinere.

Tabel IV.A.1. Data Umum Luas Wilayah dan Jumlah Desa/Kelurahan di Wilayah Kota Depok Tahun 2023

<b>Kecamatan Subdistrict</b>	<b>Ibukota Kecamatan Capital of Subdistrict</b>	<b>Luas Total Area (km<sup>2</sup>/sq.km)</b>
(1)	(2)	(3)
Sawangan	Sawangan	26.07
Bojongsari	Bojongsari	19.41
Pancoran Mas	Pancoran Mas	18.05
Cipayung	Cipayung	11.37
Sukmajaya	Sukmajaya	17.37
Cilodong	Cilodong	15.38
Cimanggis	Cimanggis	21.78
Tapos	Tapos	33.43
Beji	Beji	14.63
Limo	Limo	11.89
Cinere	Cinere	10.53
<b>Kota Depok</b>		<b>199.91</b>

Sumber: *Kota Depok Dalam Angka Tahun 2024*

Kecamatan Pancoran Mas menjadi kecamatan dengan jarak terpendek dari pusat Kota Depok (1,3 km), sedangkan Kecamatan Tapos memiliki jarak terpanjang dari pusat Kota Depok (15,2 km). Dari 11 Kecamatan yang ada di Kota Depok, kecamatan yang memiliki wilayah terluas adalah Kecamatan Tapos dengan luas mencapai 33,26 km<sup>2</sup> atau 16,61 persen dari luas keseluruhan Kota Depok. Kemudian kecamatan yang tersempit adalah Kecamatan Cinere dengan luas 10,55 km<sup>2</sup> atau 5,27 persen dari luas keseluruhan Kota Depok.

## B. Agroekologi

Secara topografi, Kota Depok merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian 77 - 150 meter diatas permukaan air laut (DPAL), yang merupakan dataran rendah – perbukitan bergelombang lemah. Bagian Utara umumnya berupa dataran rendah, sedangkan di wilayah bagian Selatan umumnya merupakan daerah bergelombang. Sebagian besar ketinggian Kota Depok berkisar antara 40-70 mdpl yang berada di bagian tengah Kota Depok dengan sebaran seluruhnya di Kecamatan Beji, sebagian kecil di bagian Selatan Kecamatan Cinere, hampir seluruhnya di Kecamatan Cimanggis, sebagian di Kecamatan Bojongsari bagian Utara, dan sebagian besar di Kecamatan Pancoran Mas. Sedangkan bagian selatan Kota Depok memiliki ketinggian 100-140 mdpl, antara lain berada di Kecamatan Sawangan, Kecamatan Cipayung, Kecamatan Cilodong, dan Kecamatan Tapos. Secara umum kemiringan lereng di Kota Depok hampir rata dengan rata-rata kemiringan 0-8 %, adapun kemiringan 8-15 % hanya terdapat di wilayah sektor sempadan sungai.

Kota Depok sebagai wilayah perkotaan yang letaknya berbatasan langsung dengan ibukota negara memang bukanlah wilayah yang dapat memproduksi hasil pertanian dalam jumlah yang cukup untuk penduduknya. Namun bukan berarti sektor pertanian tidak dikembangkan di Kota Depok. Pertanian di Kota Depok dikembangkan dalam konsep pertanian perkotaan, dimana kegiatan pertanian diusahakan di setiap lahan yang bisa dimanfaatkan serta mencegah alih fungsi lahan pertanian. Lahan sawah yang ditanami padi masih bisa ditemui di enam dari sebelas kecamatan yang ada di Kota Depok. Kecamatan yang tidak memiliki lahan sawah hanya Sukmajaya, Cimanggis, Beji, Cinere dan Pancoran Mas. Ini disebabkan karena kelima kecamatan tersebut telah terlanjur menjadi sentra pemukiman yang padat. Secara umum jenis tanah yang terdapat di Kota Depok terdiri dari:

- a. Alluvial coklat kekuningan, tanah endapan yang masih muda, terbentuk dari endapan lempung, debu dan pasir tersingkap di jalur sungai, tingkat kesuburan sedang–tinggi.
- b. Alluvial kelabu, bersifat fisik keras dan pijal jika kering dan lekat jika basah. Kaya akan fosfor yang mudah larut dalam sitrat 2% mengandung 5% CO<sub>2</sub> dan tepung kapur yang halus dan juga berstruktur pejal dalam keadaan kering dapat pecah menjadi fragmen berbentuk persegi sedang sifat kimiawinya sama dengan bahan asalnya.
- c. Asosiasi Latosol Coklat Kemerahan Laterit Air Tanah, tanah latosol yang perkembangannya dipengaruhi air tanah, tingkat kesuburan sedang, kandungan air tanah cukup banyak, sifat fisik tanah sedang – kurang baik.
- d. Kompleks alluvial Coklat dan Alluvial Coklat Keabuan.
- e. Latosol Coklat Kemerahan, tanah yang belum begitu lanjut perkembangannya, terbentuk dari tufa vulkan andesitis – basaltis, tingkat kesuburnya rendah – cukup, mudah meresapkan air, tahan terhadap erosi, tekstur halus.

f. Latosol Merah, berasal dari vulkan intermedier, tanah ini subur, dan dimanfaatkan untuk pertanian dan perkebunan.

Wilayah Kota Depok termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi oleh iklim muson, musim kemarau bulan April – September dan musim penghujan antara bulan Oktober – Maret. Kondisi iklim di daerah Depok relatif sama Adapun kondisi iklim di Kota Depok sebagai berikut:

- Temperatur : 24,3-33 derajat Celsius
- Kelembaban rata-rata : 82 %
- Penguapan rata-rata : 3,9 mm/th
- Kecepatan angin rata-rata : 3,3 knot
- Penyinaran matahari rata-rata : 49,8 %
- Jumlah curah hujan : 2684 mm/tahun
- Jumlah hari hujan : 222 hari/tahun

Kondisi curah hujan di seluruh wilayah di daerah Kota Depok relatif sama dengan kadar curah hujan sepanjang tahun, yang ditandai oleh perbedaan curah hujan yang cukup kecil. Curah hujan di Kota Depok terdiri dari:

- a. 1500–2000 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- b. 2000–2500 mm/thn, terjadi di bagian utara wilayah Kota Depok,
- c. 2500–3000 mm/thn, terjadi di bagian tengah wilayah Kota Depok,
- d. 3000–3500 mm/thn, terjadi di wilayah selatan–timur Kota Depok.

Di Kota Depok terdapat dua sumber daya air yaitu sungai dan situ. Secara umum sungai-sungai di Kota Depok termasuk kedalam Wilayah Sungai Ciliwung - Cisadane. Kota Depok memanfaatkan potensi sungai ini sebagai sumber air baku bagi Perusahaan Daerah Air Minum. Terdapat 6 sungai besar yang melintasi wilayah kota Depok yang merupakan bagian dari WS Ciliwung - Cisadane, yaitu Sungai Ciliwung, Sungai Angke, Sungai Cipinang, Sungai Sugutamu, Sungai Pesanggrahan, dan Sungai Krukut serta beberapa sungai kecil yang merupakan anak sungai dan saluran irigasi. Kesemuanya itu hanya melintas di Kota Depok dan bermuara di DKI Jakarta.

Selain itu, Kota Depok merupakan kota yang memiliki banyak situ atau danau. Situ di Kota Depok berjumlah 24 buah sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 2.3 di bawah ini. Beberapa situ sudah berubah fungsi karena mengalami alih fungsi menjadi perumahan dan pemukiman. Luas keseluruhan situ yang ada di Kota Depok berdasarkan data raperda RTRW

Tahun 2020-2040 diarahkan seluas 161,02 Ha dengan kedalaman situ yang ada Kota Depok bervariasi antara 1 sampai 5 meter.

Secara umum Kota Depok memiliki daya dukung yang cukup untuk kegiatan pengembangan budidaya baik budidaya pertanian maupun non pertanian. Namun ada beberapa bagian wilayah yang memiliki daya dukung rendah untuk pengembangan meskipun dengan upaya teknologi yaitu daerah dengan kemiringan lereng curam/tinggi, rawan longsor, dan potensi erosi, di antaranya adalah kawasan sempadan Sungai Ciliwung, Cikeas, Pesanggrahan dan Sungai Angke. Selain itu daerah yang termasuk wilayah kendala/limitasi adalah sempadan jalur pipa gas, sempadan jalan kereta api, sempadan situ dan sempadan jalur distribusi energi listrik saluran udara tegangan tinggi (SUTT) dan saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET).

Berdasarkan Raperda tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Depok Tahun 2020-2040, strategi pengelolaan pertumbuhan kawasan budidaya dimaksudkan untuk membentuk ruang kota yang kompak dan efisien dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan, meliputi:

- a. mempertahankan kawasan terbangun berkepadatan rendah di sebagian wilayah
- b. membatasi pemanfaatan ruang di kawasan resapan air
- c. mengendalikan perkembangan kawasan pusat kota
- d. mengoptimalkan perkembangan subpusat kota
- e. mengelola perkembangan kegiatan industri
- f. mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai daya dukung dan daya tampung
- g. memfasilitasi pertumbuhan kawasan perumahan secara vertikal
- h. mengarahkan pemanfaatan ruang bawah tanah secara terkendali
- i. pengembangan tumpungan air harus terpadu sebagai upaya untuk penambahan cadangan air baku daerah

Adapun strategi penyediaan fasilitas keagamaan dalam setiap kegiatan pemanfaatan ruang, meliputi:

- a. mengarahkan setiap kegiatan pemanfaatan ruang untuk menyediakan fasilitas keagamaan sesuai standar yang berlaku; dan
- b. mengembangkan pusat kegiatan keagamaan berskala kota bagi pemeluk agama yang jumlahnya mayoritas.

Perkembangan tata guna lahan di Kota Depok mencatat adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan dari fungsi pengembangan perumahan menjadi industri. Selain itu,

terdapat kecenderungan perkembangan kawasan perumahan formal maupun swadaya pada lahan yang diperuntukan bagi kegiatan pertanian, kawasan lindung setempat (sempadan sungai/irigasi dan situ ) serta meningkatnya intensitas lahan pada kawasan perumahan kepadatan rendah menjadi kepadatan sedang bahkan cenderung kepadatan tinggi. Selain itu berkembangnya guna lahan sepanjang jalan-jalan utama Kota Depok menjadi kawasan fungsi campuran (mix used) antara peruntukan perkantoran, perdagangan retail dan non retail.

Perkembangan tata guna lahan di wilayah Kota Depok ke depan akan terjadi tekanan seiring dengan perkembangan penduduk dan dinamika wilayah sekitarnya. Dalam satu dekade terakhir terjadi peningkatan penggunaan lahan baik untuk pembangunan perumahan, perkantoran ataupun pusat-pusat bisnis, dengan laju penggunaan lahan terbesar adalah untuk perumahan. Tekanan terhadap tata guna lahan ini terjadi merata kawasan Pusat Pelayanan Kota (PPK) meliputi PPK Margonda, PPK Bojongsari, PPK Tapos, dan PPK Cipayung, serta 63 Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL). Tekanan ini mendorong meningkatnya tutupan lahan sehingga kewajiban menyediakan RTH 30 % dari luas wilayah semakin sulit. Wilayah-wilayah yang menjadi penyangga air harus dipertahankan sebagai ruang terbuka hijau, seperti di kawasan selatan yang berbatasan dengan Bogor, sedangkan untuk kawasan pengembangan harus lebih di arahkan pada kawasan timur (Cimanggis, Tapos) dan Barat (Sawangan).

Penggunaan lahan di Kota Depok secara urutan waktu, tutupan lahan mengalami perubahan sebagian besar menjadi wilayah terbangun. Perubahan tutupan lahan sangat dipengaruhi dari aktivitas pemanfaatan lahan yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Pertambahan jumlah penduduk yang berimplikasi pada kebutuhan ruang. Berdasarkan data tutupan lahan tahun 2019 yang diperoleh dari Bappeda, Kota Depok memiliki 95 jenis tutupan lahan, terlihat bahwa setiap jenis tutupan lahan di Kota Depok tersebar secara acak dan tidak membentuk blok tutupan lahan tertentu. Namun, terlihat bahwa tutupan lahan gedung/bangunan banyak tersebar di wilayah bagian tengah Kota Depok dan bagian timur dan barat didominasi oleh hutan campuran dan kebun campuran.

Dari 95 jenis tutupan lahan di Kota Depok, gedung/bangunan adalah jenis tutupan lahan yang paling dominan dengan proporsi luasan sebesar 23,52% dari wilayah Kota Depok. Selain gedung/bangunan, tutupan lahan berupa ruang pekarangan dan semak belukar memiliki luasan dominan kedua dan ketiga di Kota Depok dengan proporsi luasan sebesar 23,50% dan 16,10%. Tanah kosong digambarkan sebagai tutupan lahan tersendiri dengan luasan berada di urutan keempat setelah gedung/bangunan dan pekarangan dan semak belukar, yaitu seluas 6,59%. Terdapat pula tutupan lahan jalan (6,47%), Rumah

Komplek/Properti Real Estate (5,46%), dan Tegalan/Ladang (3,79%). Hutan Campuran, Perkebunan/Kebun dan Kolam secara berurutan memiliki proporsi luasan sebesar 3,35%; 1,63%; dan 1,20%. Sementara itu, tutupan lahan yang lainnya memiliki proporsi luasan dibawah 1%.

Luas lahan sawah yang ada di Kota Depok Tahun 2023 paling banyak terdapat di Kecamatan Tapos dan Kecamatan Cipayung dengan luas lahan sawah masing-masing 36 hektar dan 7 hektar. Produksi tanaman Padi Sawah di Kota Depok sebesar 385,7 ton. Kemudian produksi tanaman Palawija di Kota Depok yaitu 681,55 ton. Produksi tanaman palawija tersebesar adalah Ubi Jayu sebesar 605,7 ton. Luas area budidaya perikanan darat di Kota Depok Tahun 2023 paling luas terdapat di Kecamatan Bojongsari dan Sawangan dengan luas lahan masing masing 4.320 hektar dan 1.970 hektar.

### C. Demografi

Populasi Penduduk Kota Depok berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2023 sebanyak 2.145.400 jiwa, yaitu penduduk laki-laki sebanyak 1.080.541 jiwa dan perempuan 1.064.859 jiwa. Jumlah penduduk laki laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan dengan besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 sebesar 101.

Peningkatan jumlah penduduk di Kota Depok dipengaruhi oleh faktor non-demografi yaitu tingkat kesehatan, pendidikan, dan ekonomi masyarakat yang semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, pesatnya pertumbuhan Kota Depok sebagai daerah pemukiman menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan penduduk di Kota Depok. Perkembangan faktor tersebut mempengaruhi tingkat fertilitas/kelahiran penduduk Kota Depok. Sementara faktor demografi yang mempengaruhi meningkatnya jumlah penduduk Kota Depok adalah selain tingkat kelahiran juga tingginya arus migrasi yang masuk ke Kota Depok, di mana Kota Depok yang berbatasan langsung dengan DKI Jakarta sebagai pusat perekonomian ibu kota negara, menjadikan Depok sebagai wilayah yang sangat strategis untuk permukiman. Selain itu, Depok sebagai kota jasa pendidikan yang dicirikan dengan berdirinya beberapa perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, juga memberi andil dalam kenaikan jumlah penduduknya.

Di Kota Depok, selain pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi, permasalahan lain yang muncul adalah persebaran penduduk yang belum merata antar wilayah, dan kualitas penduduk yang relatif masih rendah. Apabila tidak ditangani dengan baik tentunya akan menimbulkan masalah yang cukup serius. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah terkait masalah kependudukan harus terus dilaksanakan dalam upaya memperbaiki kualitas hidup masyarakat sehingga kesejahteraan hidup masyarakat dapat ditingkatkan. Selain itu, program-

program pembangunan harus ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi aspek pendidikan, kesehatan, ketersediaan lapangan pekerjaan dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kepadatan Penduduk di 11 kecamatan bervariasi, dengan kepadatan tertinggi terletak di kecamatan Cipayung yaitu sebesar 16.265 orang/km<sup>2</sup> dan terendah di Kecamatan Sawangan dan Bojongsari masing-masing sebesar 7.563 orang/ km<sup>2</sup>. Persentase angkatan kerja di Kota Depok pada tahun 2023 sebesar 62,76 persen. Sedangkan Bukan Angkatan Kerja sebesar 37,24 persen.

Kota Depok mempunyai jumlah penduduk usia produktif yang sangat besar, sebesar 70,98 persen dari penduduknya adalah pada kelompok usia 15-64 tahun (termasuk dalam angkatan kerja) yang dapat berpeluang untuk meningkatkan produktivitas dan potensi bagi pembangunan di Kota Depok, apalagi jika didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas. Besarnya jumlah penduduk usia produktif apabila tidak diiringi dengan peningkatan SDM tentunya hasilnya tidak akan maksimal. Untuk itu diperlukan peningkatan kompetensi yang relevan dengan permintaan dunia kerja sehingga Kota Depok dapat merasakan keuntungan dari besarnya penduduk usia produktif yang dinamakan bonus demografi.

Berdasarkan hasil Sakernas, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di Kota Depok mengalami penurunan dari 62,62 persen pada tahun 2021 menjadi 63,35 persen pada tahun 2022. Begitu pula Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kota Depok selama kurun waktu 2020-2022 mengalami penurunan, dari 9,87 persen pada tahun 2020 menjadi 7,82 persen pada tahun 2022 persen. Persentase penduduk berumur 15 tahun katas yang bekerja terhadap penduduk usia kerja (penduduk usia 15 tahun keatas) selama kurun waktu tahun 2020-2022 terjadi peningkatan, yaitu sebesar 90,13 persen pada tahun 2020 naik menjadi 92,18 persen pada tahun 2022. Sedangkan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja mengalami kenaikan dari 62,62 persen pada tahun 2021 menjadi 63,35 persen pada tahun 2022. Persentase penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja mengalami penurunan, dari 37,38 persen pada tahun 2021 menjadi 36,65 persen pada tahun 2022

## D. Ekonomi

Salah satu indikator untuk mengetahui kondisi perekonomian secara makro adalah data produk regional bruto (PDRB). Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil pembangunan yang telah

dilaksanakan. Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain : (1) Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan setiap sektor ekonomi; (2) Untuk mengetahui tingkat struktur perekonomian; (3) Untuk mengetahui besarnya PDRB per Kapita penduduk sebagai salah satu indikator tingkat kemakmuran/kesejahteraan; (4) Untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi berdasarkan pertumbuhan harga produsen.

Laju Pertumbuhan Ekonomi merepresentasi kenaikan kapasitas produksi suatu daerah dari tahun ke tahun, yang diperoleh dari hasil perbandingan pertambahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada tahun berjalan dengan PDRB tahun sebelumnya. Sedangkan PDRB itu sendiri merupakan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dari seluruh kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah pada tahun tertentu atau periode tertentu. Perekonomian Kota Depok tahun 2023 tumbuh melambat sebesar 5,05 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Melambatnya kinerja perekonomian di tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya dipengaruhi oleh melambatnya pertumbuhan kategori Transportasi dan Pergudangan dari 10,52 persen di tahun 2022 menjadi 5,62 persen ditahun 2023. Hal ini dipengaruhi kembali normalnya jumlah penumpang komuter line di tahun 2023 dimana tahun sebelumnya terjadi lonjakan jumlah penumpang komuter line akibat dihapuskannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) pasca covid.

Sektor industri pengolahan merupakan kategori lapangan usaha yang memiliki kontribusi paling besar terhadap PDRB Kota Depok. Pada tahun 2023 kontribusi kategori ini sebesar 28,86 persen. Disusul oleh kategori perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 21,11 persen. Kota depok mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,05 persen, hal ini membuat peringkat pertumbuhan ekonomi Kota Depok berada pada urutan ke 16 di Jawa Barat. Rata-rata pengeluaran per kapita sebulan makanan dan bukan makanan di provinsi Jawa Barat sebesar Rp. 1.567.666,00.

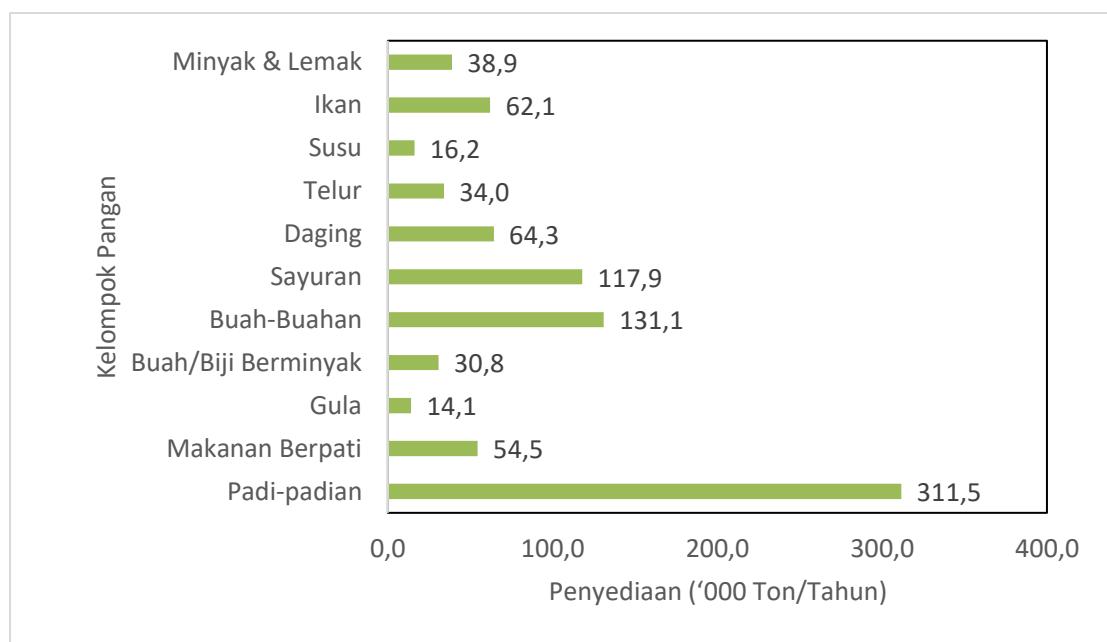
Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2023 sebesar 2,38 persen. Persentase penduduk miskin Kota Depok tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,15 persen poin, dari 2,53 persen menjadi 2,38 persen. Persentase penduduk miskin pada tahun 2023 ini semakin mendekati persentase penduduk miskin pada tahun 2016-2017. Pada Tahun 2021 pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kota Depok mencapai Rp 2.304.941 dan meningkat menjadi Rp 2.538.382 pada tahun 2022 dengan pengeluaran konsumsi non makanan yang lebih tinggi dibandingkan pengeluaran konsumsi makanan, masing masing sebesar 58,48 persen dan 41,52 persen. Berdasarkan data Susenas, selama kurun waktu tahun 2020-2022 pengeluaran konsumsi makanan mengalami kenaikan sejalan dengan pengeluaran konsumsi non makanan. Peningkatan pengeluaran rata-rata per kapita penduduk Kota Depok dan pergeseran pola konsumsi ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk Kota Depok semakin membaik.

## V. SITUASI PENYEDIAAN PANGAN

Situasi penyediaan pangan di wilayah Kota Depok mengalami fluktuasi dari waktu ke waktu dan sangat beragam antar antar kelompok pangan maupun antar jenis pangan dalam suatu kelompok pangan. Secara agroekologis, wilayah Kota Depok bukan merupakan daerah yang memiliki potensi sebagai sentra produksi pangan, sehingga secara otomatis akan memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan pangan dari wilayah lain. Selain itu, wilayah Kota Depok berperan pula sebagai kolektor dan distributor beberapa komoditas pangan strategis dari dan ke wilayah lain, khususnya ke wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Oleh karena itu, analisis tingkat ketergantungan wilayah terhadap pasokan pangan dari luar wilayah menjadi lebih penting dibandingkan analisis tingkat swasembada pangan.

### A. Kontribusi Penyediaan Per Kelompok Pangan

Mengacu pada hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok, kelompok pangan padi-padian memiliki volume penyediaan yang paling besar dibandingkan kelompok pangan lainnya, yaitu mencapai sekitar 311,5 ribu ton/tahun. Sebagaimana data yang disajikan pada Gambar V.A.1 buah-buahan dan sayuran merupakan dua kelompok pangan yang memiliki volume penyediaan yang cukup besar dibandingkan kelompok pangan lainnya selain padi-padian (masing-masing mencapai 131,1 ribu dan 117,9 ribu ton/tahun). Sementara kelompok pangan yang volume penyediannya paling rendah di Kota Depok berdasarkan Nercaca Bahan Makanan Tahun 2023 adalah gula yang hanya mencapai 14,1 ribu ton/tahun.



Gambar V.A.1. Estimasi Volume Penyediaan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

Kontribusi masing-masing kelompok pangan berdasarkan volume dan asal pangan serta tingkat kemandiriannya disajikan pada Tabel V.A.1. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut secara umum total volume penyediaan pangan di wilayah Kota Depok tahun 2023 mencapai lebih dari 900 ribu ton. Sebagian besar penyediaan pangan tersebut merupakan pasokan dari luar wilayah Kota Depok (96,5%). Daging merupakan kelompok pangan yang memiliki tingkat ketergantungan paling rendah dengan volume produksi yang mencapai sekitar 10,8 ribu ton/tahun.

**Tabel V.A.1. Estimasi Volume Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)				Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Eksport	Penyediaan	%	Swa sembada	Ketergantungan
1.	Padi-padian	243,6	311.531,5	311.775,1	34,4	0,1	99,9
2.	Makanan Berpati	635,5	54.520,6	55.156,1	6,1	1,2	98,8
3.	Gula	0,0	14.099,7	14.099,7	1,6	0,0	100,0
4.	Buah/Biji Berminyak	11,3	30.834,1	30.845,4	3,4	0,0	100,0
5.	Buah-Buahan	13.676,0	131.060,4	144.736,4	16,0	9,4	90,6
6.	Sayuran	1.525,5	117.922,3	119.447,7	13,2	1,3	98,7
7.	Daging	10.828,5	64.263,3	75.091,8	8,3	14,4	85,6
8.	Telur	1.328,0	34.033,2	35.361,2	3,9	3,8	96,2
9.	Susu	1.200,0	16.222,5	17.422,5	1,9	6,9	93,1
10.	Ikan	1.965,6	62.080,6	64.046,3	7,1	3,1	96,9
11.	Minyak dan Lemak	267,8	38.908,3	39.176,1	4,3	0,7	99,3
Total Pangan		31.681,9	875.476,5	907.158,4	100,0	3,5	96,5

Kelompok pangan lain yang memiliki volume produksi yang relatif signifikan adalah kelompok buah-buahan dengan volume produksi meencapai sekitar 13,7 ribu ton/tahun dengan tingkat kemandirian yang mencapai 9,4 persen. Sementara itu berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok, kelompok gula dan buah/biji berminyak memiliki volume produksi yang sangat kecil sehingga penyedianya hampir 100 persen mengandalkan pasokan dari luar daerah.

## **B. Tingkat Penyediaan Per Komoditas Pangan**

### ***1. Padi-padian***

Bahan pangan utama yang termasuk dalam kelompok padi-padian terdiri dari : beras, jagung, dan terigu. Situasi penyediaan pangan di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 untuk kelompok pangan padi-padian disajikan pada Tabel V.B.1. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, total penyediaan pangan kelompok padi-padian di

wilayah Kota Depok pada tahun 2023 mencapai sekitar 250.560,9 ton beras, 2.402,6 ton jagung pipilan, 26,3 ton jagung basah, dan 58.485,4 ton terigu.

Tabel V.B.1. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Padi-padian Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Beras Giling	217,4	250.343,5	250.560,9	0,1	99,9
2.	Jagung Pipilan	0,0	2.702,6	2.702,6	0,0	100,0
3.	Jagung Basah	26,3	0,0	26,3	100,0	0,0
4.	Tepung Terigu	0,0	58.485,4	58.485,4	0,0	100,0

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.1 secara umum terlihat bahwa kelompok pangan padi-padian, memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap pasokan dari luar daerah, khususnya untuk tepung terigu. Terigu merupakan salah satu jenis pangan yang sepenuhnya dipasok dari luar daerah, sedangkan untuk beras dan jagung, hasil produksi masih memberikan kontribusi meskipun kurang signifikan.

## 2. Makanan Berpati

Makanan berpati atau juga dikenal dengan istilah umbi-umbian merupakan kelompok jenis pangan yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi yang diharapkan mampu menjadi alternatif pilihan pangan dalam rangka mengurangi tingginya ketergantungan terhadap konsumsi beras dan tepung terigu. Oleh karena itu, penyediaan kelompok pangan ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan penduduk. Data situasi penyediaan pangan di wilayah Kota Depok berdasarkan perhitungan NBM tahun 2023 untuk kelompok pangan makanan berpati disajikan pada Tabel V.B.2.

Tabel V.B.2. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Makanan Berpati di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Ubi Jalar	29,8	10.652,8	10.682,6	0,3	99,7
2.	Ubi Kayu	605,7	43.119,0	43.724,7	1,4	98,6
3	Tepung Sagu	0,0	748,8	748,8	0,0	100,0

Berdasarkan data yang disajikan pada V.B.2 tersebut di atas, penyediaan pangan kelompok makanan berpati di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 untuk ubi jalar mencapai 10.682,65 ton, ubi kayu 43.724,7 ton, dan tepung sagu 748,8 ton per tahun. Penyediaan pangan untuk komoditas ubi jalar, ubi kayu dan tepung sagu yang merupakan salah satu pangan sumber karbohidrat selain beras di Kota Depok, ternyata memiliki tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang sangat tinggi. Meskipun masih terdapat hasil produksi yang cukup signifikan khususnya ubi kayu 605,7 (ton/tahun), tetapi masih relatif sangat kecil dibandingkan tingkat penyediaannya, sehingga tingkat kemandirian swasembada hanya sekitar 1,4 %.

### **3. Gula**

Pangan kelompok gula untuk konsumsi penduduk merupakan produk industri olahan pangan, baik skala rumah tangga maupun skala pabrik. Mengingat wilayah Kota Depok bukan wilayah perkebunan tebu sebagai bahan baku gula pasir, maka penyediaan pangan untuk jenis pangan tersebut sepenuhnya diperoleh dari luar wilayah Kota Depok. Berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok, gula pasir merupakan pangan utama kelompok gula dengan total penyediaan mencapai 12.658,2 ton. Sementara itu, penyediaan gula merah pada tahun yang sama hanya sekitar 1.441,6 ton. Kedua jenis pangan tersebut sepenuhnya bersumber dari luar daerah sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.3.

Tabel V.B.3. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swa sembada	Ketergantungan
1.	Gula Pasir	0,0	12.658,2	12.658,2	0,0	100,0
2.	Gula Merah	0,0	1.441,6	1.441,6	0,0	100,0

### **4. Buah/Biji Berminyak**

Bahan pangan utama yang termasuk dalam kelompok buah/biji berminyak terdiri dari : kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, dan kelapa. Data ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 untuk kelompok pangan tersebut disajikan pada Tabel V.B.4.

Seperti halnya padi-padian, untuk kelompok pangan kacang-kacangan umumnya hampir sepenuhnya diimpor dari luar wilayah Kota Depok. Hanya kacang tanah yang menunjukkan adanya hasil produksi setempat yang hanya sekitar 11,3 ton per tahun. Total penyediaan pangan kelompok kacang-kacangan di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 untuk kacang tanah mencapai 557,3 ton, kacang kedelai 27.398,1 ton, kacang hijau 1.331,0 ton dan kelapa berkulit 1.558,9 ton per tahun.

**Tabel V.B.4. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Gula di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Kacang Tanah	11,3	546,1	557,3	2,0	98,0
2.	Kacang Kedelai	0,0	27.398,1	27.398,1	0,0	100,0
3.	Kacang Hijau	0,0	1.331,0	1.331,0	0,0	100,0
4.	Kelapa Berkulit	0,0	1.558,9	1.558,9	0,0	100,0

## **5. Buah-buahan**

Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Depok, jenis buah-buahan dengan volume penyediaan di wilayah Kota Depok yang relatif besar dibandingkan komoditas yang lain adalah pisang (34.607,5 ton), dan jeruk (28.969,4 ton). Penyediaan dari produksi untuk kedua jenis buah-buahan tersebut, relatif tidak signifikan sehingga hampir sepenuhnya dipasok dari luar Wilayah Kota Depok.

Buah-buahan dengan penyediaan dari hasil produksi yang cukup signifikan dan tingkat kemandirian yang relatif tinggi dibandingkan komoditas lain adalah jambu (6.326,5 ton dengan tingkat kemandirian sekitar 71,8 %), serta belimbing dan rambutan (masing sekitar 2.015,3 ton dan 1.689,3 ton dengan kemandirian 100% persen).

Secara umum data pada Tabel V.B.5 juga menunjukkan bahwa pasokan buah-buahan ke Wilayah Kota Depok jauh melebihi kebutuhan konsumsi penduduknya, sehingga sebagian komoditas buah-buahan yang ada di Wilayah Kota Depok juga dipasok ke wilayah lain khususnya ke wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kota Depok masih memegang peranan yang sangat strategis dalam pengembangan agribisnis untuk beberapa komoditas buah-buahan tersebut.

Tabel V.B.5. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Alpokat	605,1	5.431,1	6.036,2	10,0	90,0
2.	Jeruk	71,4	28.898,0	28.969,4	0,2	99,8
3.	D u k u	70,1	249,8	319,9	21,9	78,1
4.	Durian	936,7	0,0	936,7	100,0	0,0
5.	Jambu	6.326,5	2.485,8	8.812,3	71,8	28,2
6.	Mangga	288,6	13.079,0	13.367,6	2,2	97,8
7.	Nenas	1,0	0,0	1,0	100,0	0,0
8.	Pepaya	299,8	7.082,5	7.382,3	4,1	95,9
9.	Pisang	1.106,3	33.501,2	34.607,5	3,2	96,8
10.	Rambutan	1.689,3	0,0	1.689,3	100,0	0,0
11.	Salak	0,0	12.586,5	12.586,5	0,0	100,0
12.	Semangka	0,0	11.254,6	11.254,6	0,0	100,0
13.	Belimbing	2.015,3	0,0	2.015,3	100,0	0,0
14.	Apel	0,0	4.513,1	4.513,1	0,0	100,0
15.	Lainnya	265,9	11.978,8	12.244,7	2,2	97,8

## 6. Sayuran

Data penyediaan pangan untuk kelompok pangan sayur-sayuran di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 disajikan pada Tabel V.B.6. Berdasarkan data yang disajikan pada tabel tersebut, volume penyediaan sayur-sayuran relatif lebih merata dibandingkan dengan kelompok buah-buahan. Komoditas sayuran yang lebih besar volume penyediannya dibandingkan komoditas yang lain adalah cabai (26.414,3 ton), sawi (14.906,3 ton), bayam (13.912,7 ton), kangkung (13.783,3 ton), dan bawang merah (11.014,0 ton). Dari kelima komoditas sayur-sayuran tersebut, hanya kangkung, bayam dan sawi yang jumlah produksi agak signifikan sehingga tidak sepenuhnya tergantung pasokan dari luar Wilayah Kota Depok.

Dari berbagai jenis-jenis pangan kelompok sayuran tersebut diatas bawang merah dan bawang putih merupakan komoditas-komoditas yang penyediaanya seratus persen diperoleh dari luar daerah. Sementara itu untuk ketimun, kacang panjang, tomat, cabai, petsai/sawi, kangkung, buncis, bayam, jamur, melinjo, petai, jengkol, dan sayuran lainnya jumlah

produksinya masih cukup signifikan sehingga tingkat ketergantungan terhadap impornya juga relatif lebih rendah.

Tabel V.B.6. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Buah-Buahan di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Bawang Merah	0,0	11.014,0	11.014,0	0,0	100,0
2.	Bawang Putih	0,0	7.655,8	7.655,8	0,0	100,0
3.	Ketimun	2,0	8.499,4	8.501,4	0,0	100,0
4.	Kacang Panjang	7,5	5.232,7	5.240,2	0,1	99,9
5.	Tomat	0,0	1.218,2	1.218,2	0,0	100,0
6.	C a b e	21,5	26.392,8	26.414,3	0,1	99,9
7.	Terung	1,1	5.315,2	5.316,3	0,0	100,0
8.	Sawi	203,6	14.702,7	14.906,3	1,4	98,6
9.	Kangkung	883,2	12.900,1	13.783,3	6,4	93,6
10.	Labu siam	0,0	5.377,3	5.377,3	0,0	100,0
11.	Buncis	0,0	3.723,6	3.723,6	0,0	100,0
12.	Bayam	371,9	13.540,8	13.912,7	2,7	97,3
13.	Sayuran lainnya	34,7	2.349,7	2.384,4	1,5	98,5

Secara umum data pada Tabel V.B.6 juga menunjukkan bahwa sebagaimana komoditas buah-buahan, jumlah pasokan komoditas sayur-sayuran ke Wilayah Kota Depok juga jauh melebihi kebutuhan konsumsi penduduknya, sehingga sebagian komoditas sayur-sayuran yang ada di Wilayah Kota Depok juga dipasok lagi ke wilayah lain khususnya ke wilayah DKI Jakarta. Hal tersebut menunjukkan bahwa wilayah Kota Depok masih memegang peranan yang sangat strategis juga dalam pengembangan agribisnis untuk beberapa komoditas sayuran tersebut.

## 7. Daging

Pangan kelompok daging merupakan sumber utama protein hewani, sehingga tingkat ketersediaanya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan protein yang dibutuhkan penduduk di suatu wilayah. Data penyediaan pangan untuk kelompok daging di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 disajikan pada Tabel V.B.7. Data tersebut menunjukkan bahwa pangan kelompok daging yang paling dominan volume penyediannya adalah daging sapi (45.275,5 ton) dan daging ayam ras (45.275,5 ton). Tingkat

ketergantungan terhadap pasokan dari luar untuk kelompok daging ruminansia, seperti daging sapi di Wilayah Kota Depok pada tahun 2023 relatif lebih rendah dibandingkan dengan kelompok daging unggas. Hal ini sedikit banyak berhubungan dengan relatif cukup signifikannya produksi daging ruminansia di wilayah Kota Depok, khususnya daging sapi yang mencapai 6,670,4 ton/tahun sehingga tingkat kemandiriannya mencapai sekitar 27,3 persen. Sementara itu, produksi daging unggas, khususnya ayam ras di Kota Depok relatif rendah (1.231,7 ton) dibandingkan total penyediannya yang mencapai sekitar 45.275,5 ton sehingga tingkat kemandiriannya ganya mencapai sekitar 2,7 persen.

**Tabel V.B.7. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Daging di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swa sembada	Ketergantungan
1.	Daging Sapi	6.670,4	17.789,1	24.459,5	27,3	72,7
2.	Daging Kerbau	39,1	103,0	142,1	27,5	72,5
3.	Daging Kambing	307,8	806,2	1.114,0	27,6	72,4
4.	Daging Domba	93,6	249,7	343,3	27,3	72,7
5.	Ayam Buras	12,5	448,5	461,1	2,7	97,3
6.	Ayam Ras	1.231,7	44.043,8	45.275,5	2,7	97,3
7.	Daging Itik	23,0	820,9	843,8	2,7	97,3
8.	Jeroan Ternak	2.450,4	2,1	2.452,5	99,9	0,1

Sementara itu, meskipun penyediaannya relatif kecil dibandingkan ayam ras, penyediaan daging ayam buras dan daging itik hampir sepenuhnya mengandalkan pasokan dari luar wilayah. Secara umum dapat dikatakan bahwa berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Depok, wilayah Kota Depok tingkat ketergantungan pangan untuk kelompok komoditas daging masih relatif lebih rendah dibandingkan kelompok komoditas pangan lainnya, dimana tingkat ketergantungannya berrkisar 78,6 – 97,5 persen.

## **8. Telur**

Sebagaimana dapat dilihat pada Tabel V.B.8 secara umum produksi pangan kelompok telur di Kota Depok hanya dapat memenuhi kurang dari 4 persen dari total penyediaan pangan. Dengan kata lain lebih dari 96 persen penyediaan pangan kelompok telur dipasok dari luar daerah Kota Depok. Berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Tahgun 2023, penyediaan pangan kelompok telur didominasi oleh telur ayam ras yang mencapai sekitar 32.831,5 ton dengan tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luar mencapai 96,2 persen. Sementara untuk

komoditas telur ayam buras dan telur itik penyediaanya relatif kecil dibandingkan penyediaan telur ayam ras.

**Tabel V.B.8. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Telur di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Telur Ayam Buras	45,0	1.562,8	1.607,8	2,8	97,2
2.	Telur Ayam Ras	1.252,0	31.579,5	32.831,5	3,8	96,2
3.	Telur Itik	31,0	890,9	921,9	3,4	96,6

## **9. Susu**

Secara umum penyediaan pangan kelompok susu, khususnya jenis susu impor di wilayah Kota Depok sangat tergantung pada pasokan dari luar daerah. Sebagaimana data yang disajikan pada Tabel V.B.9 dibawah, volume penyediaan susu impor di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 mencapai sekitar 16.222,5 ton. Sementara itu, susu sapi segar tingkat penyediaanya relatif kecil dibandingkan susu impor, dimana penyediannya hanya dipenuhi dari hasil setempat.

**Tabel V.B.9. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Susu di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Susu Sapi	1.200,0	0,0	1.200,0	100,0	0,0
2.	Susu Impor	0,0	16.222,5	16.222,5	0,0	100,0

## **10. Ikan**

Sebagai negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya adalah perairan, Indonesia memiliki potensi yang sangat besar sebagai penghasil sumberdaya kelautan, khususnya komoditas ikan sebagai sumber protein hewani. Namun demikian, potensi tersebut tidak dimiliki oleh wilayah Kota Depok yang tidak memiliki wilayah laut dan hanya memiliki wilayah perairan darat yang sangat terbatas. Sebagaimana disajikan pada Tabel V.B.10. produk perikanan yang volume produksinya cukup signifikan di wilayah Kota Depok hanya ikan mas

dengan nilai produksi sekitar 430,4 ton, mujair sekitar 71,7 ton, bawal 63,8 ton dan berbagai jenis ikan budidaya air tawar lainnya sekitar 1.434,7 ton per tahun.

Tabel V.B.10. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Ikan di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penye-diaan	Swa sembada	Ketergan-tungan
1.	Tongkol	0,0	6.964,3	6.964,3	0,0	100,0
2.	Kakap	0,0	971,2	971,2	0,0	100,0
3.	Bawal	63,8	457,7	521,4	12,2	87,8
4.	Teri	0,0	450,3	450,3	0,0	100,0
5.	Kembung	0,0	11.404,6	11.404,6	0,0	100,0
6.	Tenggiri	0,0	467,4	467,4	0,0	100,0
7.	Bandeng	0,0	3.086,3	3.086,3	0,0	100,0
8.	Mujair	71,7	6.222,9	6.294,5	1,1	98,9
9.	Ikan mas	395,5	10.446,9	10.842,4	3,6	96,4
10.	Udang	0,0	2.721,6	2.721,6	0,0	100,0
11.	Kepiting	0,0	0,8	0,8	0,0	100,0
12.	Kerang darah	0,0	326,9	326,9	0,0	100,0
13.	Cumi-cumi	0,0	1.721,6	1.721,6	0,0	100,0
14.	Lainnya	1.434,7	16.838,3	18.273,0	7,9	92,1

Berdasarkan hasil analisis data Neraca Bahan Makanan Kota Depok yang disajikan pada Tabel V.B.10 tersebut diatas, secara umum sebagian besar ikan, terutama kelompok ikan laut, yang tersedia di Wilayah Kota Depok sepenuhnya dipasok dari luar wilayah. Sementara itu untuk ikan mas, ikan bawal, ikan mujair, ikan air tawar lainnya yang masih memiliki penyediaan dari hasil produksi, tingkat ketergantungan terhadap pasokan dari luarnya masih sekitar 87-99 persen.

Secara umum, berdasarkan data yang disajikan pada Tabel V.B.10 menunjukkan bahwa, ikan mas dan ikan tawar lainnya memiliki tingkat penyediaan yang relatif lebih tinggi dibandingkan komoditas ikan yang lain. Sementara itu, ikan tongkol dan ikan kembung merupakan komoditas ikan laut yang relatif lebih tinggi tingkat penyediannya dibandingkan kelompok ikan laut lainnya.

## **11. Minyak dan Lemak**

Data penyediaan pangan untuk kelompok minyak dan lemak di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 disajikan pada Tabel V.B.11. Sebagaimana dapat dilihat pada tabel tersebut, jenis pangan utama yang paling banyak volume penyediaannya untuk pangan kelompok minyak dan lemak adalah minyak sawit dengan total penyediaan sebanyak 38.739,0 ton per tahun.

Tabel V.B.11. Jumlah Penyediaan dan Tingkat Kemandirian Pangan Kelompok Minyak dan Lemak di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Jumlah Pangan (Ton)			Tingkat Kemandirian (%)	
		Produksi	Net Impor Ekspor	Penyediaan	Swa sembada	Ketergantungan
1.	Minyak Kelapa	0,0	169,3	169,3	0,0	100,0
2.	Minyak Sawit	0,0	38.739,0	38.739,0	0,0	100,0
3.	Lemak Sapi	250,1	0,0	250,1	100,0	0,0
4.	Lemak Kerbau	1,5	0,0	1,5	100,0	0,0
5.	Lemak Kambing	12,3	0,0	12,3	100,0	0,0
6.	Lemak Domba	3,8	0,0	3,8	100,0	0,0

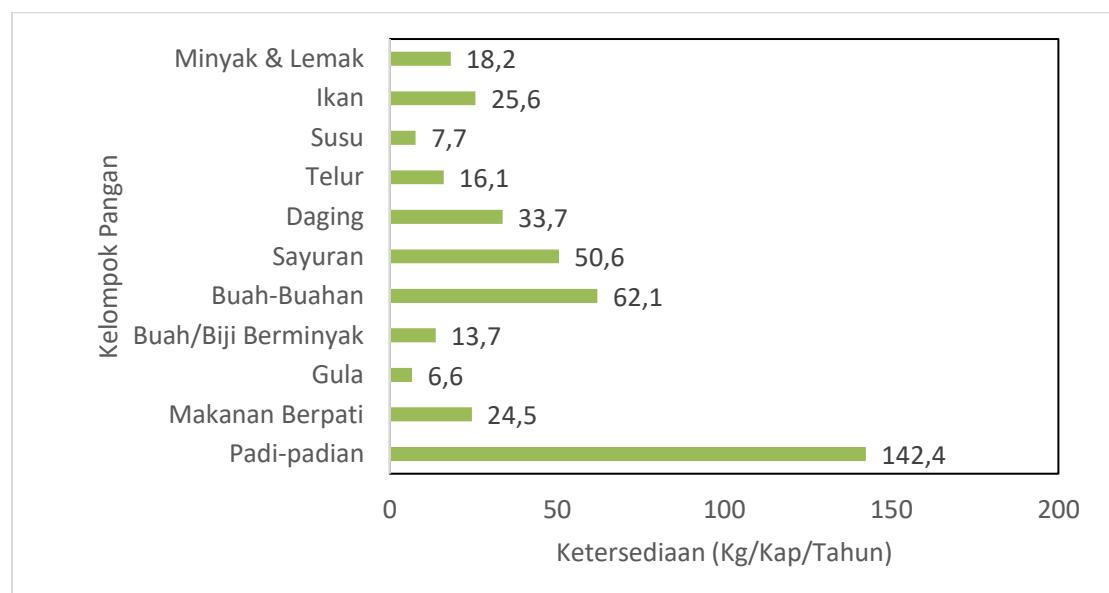
Penyediaan pangan kelompok minyak dan lemak, khususnya minyak kelapa sawit di wilayah Kota Depok sangat tergantung impor dari luar daerah. Sementara untuk pangan kelompok lemak, meskipun penyediaannya tidak langsung tergantung pada pasokan dari luar daerah, tetapi tingkat ketergantungannya juga tinggi mengingat lemak merupakan jenis pangan bawaan dari pangan-pangan kelompok daging yang memiliki ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah yang tinggi.

## VI. TINGKAT KETERSEDIAAN PANGAN

Tingginya tingkat penyediaan pangan di suatu wilayah belum dapat menjadi jaminan tingginya tingkat ketersediaan pangan untuk dikonsumsi penduduknya. Pola penanganan dan penggunaan pangan di suatu wilayah sejak pasca panen dan selama proses didistribusi sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat konsumen juga sangat menentukan tingkat ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Selain itu pada akhirnya ditentukan pula oleh jumlah populasi penduduk yang menetap di wilayah yang bersangkutan. Oleh karena itu sesuai dengan tujuan utama kegiatan penyusunan dan analisis Neraca Bahan Makanan Kota Depok, telaahan lebih lanjut terhadap data tingkat ketersediaan pangan wilayah maupun per kapita penduduk perlu dilakukan untuk dapat menilai situasi ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk di Kota Depok.

### A. Kontribusi Ketersediaan Per Kelompok Pangan

Mengacu pada hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok, sejalan dengan tingkat penyediannya, kelompok pangan padi-padian memiliki volume ketersediaan paling besar dibandingkan kelompok pangan lainnya, yaitu mencapai sekitar 142,4 kg/kapita/tahun. Buah-buahan, sayuran dan daging merupakan kelompok pangan selain padi-padian yang memiliki volume penyediaan yang cukup besar dibandingkan kelompok pangan lainnya selain padi-padian (masing-masing mencapai 62,1, 50,6, dan 33,7 kg/kap/tahun).



Gambar VI.A.1. Estimasi Volume Ketersediaan Per Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

Sementara kelompok pangan yang volume tingkat ketersediaannya relatif rendah dibandingkan yang lainnya berdasarkan Nercaca Bahan Makanan Tahun Kota Depok Tahun 2023 adalah gula dan susu yang hanya mencapai sekitar 6,6 dan 7,4 kg/kapita/tahun. Kontribusi masing-masing kelompok pangan berdasarkan volume dan asal pangan serta tingkat ketersediaannya disajikan pada Tabel VI.A.1.

Tabel VI.A.1. Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita		Kontri busi (%)
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/ Tahun	Gram/ Hari	
1.	Padi-padian	311.775,1	9.462,2	302.312,9	142,4	390,1	35,5
2.	Makanan Berpati	55.156,1	3.191,5	51.964,6	24,5	67,0	6,1
3.	Gula	14.099,7	136,7	13.963,0	6,6	18,0	1,6
4.	Buah/Biji Berminyak	30.845,4	1.787,7	29.057,7	13,7	37,5	3,4
5.	Buah-Buahan	144.736,4	12.896,9	131.839,6	62,1	170,1	15,5
6.	Sayuran	119.447,7	12.070,3	107.377,4	50,6	138,5	12,6
7.	Daging	75.091,8	3.611,0	71.480,8	33,7	92,2	8,4
8.	Telur	35.361,2	1.266,4	34.094,8	16,1	44,0	4,0
9.	Susu	17.422,5	993,1	16.429,4	7,7	21,2	1,9
10.	Ikan	64.046,3	9.606,9	54.439,3	25,6	70,2	6,4
11.	Minyak dan Lemak	39.176,1	607,1	38.569,1	18,2	49,8	4,5
Total Pangan		907.158,4	55.629,8	851.528,6	401,0	1.098,7	100,0

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.A.1 diatas secara umum volume total ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok mencapai sekitar 401,0 kg/kapita/tahun atau sekitar 1.098,7 gr/kapita hari. Tingkat ketersediaan pangan tersebut terutama terdiri dari 35,5 persen padi-padian, 15,5 persen buah-buahan dan 12,6 persen sayuran. Sementara kelompok pangan hewani seperti daging, telur, susu, dan ikan memiliki kontribusi ketersediaan antara 20,7 persen dari volume total ketersediaan pangan di Kota Depok.

## B. Tingkat Ketersediaan Per Komoditas Pangan

### 1. Padi-padian

Situasi ketersediaan pangan kelompok padi-padian untuk konsumsi penduduk di Kota Depok berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok disajikan pada Tabel VI.B.1. Komoditas utama pangan kelompok padi-padian adalah beras dengan total ketersediaan mencapai 242.221,9 ton per tahun. Sementara ketersediaan komoditas jagung terdiri dari 1.860,0 ton jagung pipilan dan 26,3 ton jagung basah. Sedangkan untuk terigu tingkat

ketersediaannya mencapai 58.204,7 ton per tahun. Dengan total ketersediaan pangan kelompok padia-padian tersebut, maka rata-rata ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok pada Tahun 2023 yang signifikan hanyalah 114,1 kg beras, dan sekitar 27,4 kg terigu per kapita/tahun.

**Tabel VI.B.1. Ketersediaan Pangan Kelompok Padi-padian Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Beras Giling	250.560,9	8.338,9	24.222,9	114,1	312,5
2.	Jagung Pipilan	2.702,6	842,6	1.860,0	0,9	2,4
3.	Jagung Basah	26,3	0,0	26,3	0,0	0,0
4.	Tepung Terigu	58.485,4	280,7	58.204,7	27,4	75,1

## **2. *Makanan Berpati***

Kelompok pangan makanan berpati atau juga dikenal dengan istilah umbi-umbian merupakan alternatif jenis pangan yang kaya akan karbohidrat sebagai sumber energi yang diharapkan mampu mengurangi tingginya ketergantungan terhadap konsumsi beras dan tepung terigu. Oleh karena itu, ketersediaan kelompok pangan ini perlu mendapat perhatian serius dalam upaya mendukung peningkatan ketahanan pangan melalui diversifikasi konsumsi pangan penduduk.

**Tabel VI.B.2. Ketersediaan Pangan Kelompok Makanan Berpati Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Ubi Jalar	10.682,6	340,2	10.342,4	4,9	13,3
2.	Ubi Kayu	43.724,7	2.851,3	40.873,4	19,2	52,7
3	Tepung Sagu	748,8	0,0	748,8	0,4	1,0

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.2, maka ketersediaan pangan kelompok makanan berpati di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 yang paling dominan adalah ubi kayu dengan total ketersediaan sekitar 40.873,4 ton atau sekitar 19,2 kg/kapita per tahun. Komoditas umbi-umbian lainnya adalah ubi jalar dengan tingkat ketersediaan mencapai

10.342,0 ton atau sekitar 4,9 kg/kapita per tahun. Sementara itu untuk tepung sagu tingkat ketersediaannya relatif sangat kecil (< 1 kg/kapita/tahun) jika dibandingkan dengan ketersediaan ubi kayu dan ubi jalar.

### **3. Gula**

Sebagaimana disajikan pada Tabel VI.B.3, total ketersediaan gula pasir berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Depok mencapai 12.522,7 ton atau rata-rata sekitar 5,9 kg/kapita per tahun. Sementara itu, rata-rata ketersediaan gula merah relatif kecil (< 1 kg/kapita/tahun) jika dibandingkan dengan gula pasir.

Tabel VI.B.3. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Gula Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Gula Pasir	12.658,2	135,4	12.522,7	5,9	16,2
2.	Gula Merah	1.441,6	1,3	1.440,3	0,7	1,9

### **4. Buah/Biji Berminyak**

Bahan pangan utama yang termasuk dalam kelompok buah/biji berminyak terdiri dari : kacang tanah, kacang kedele, kacang hijau, dan kelapa. Data ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok untuk kelompok pangan tersebut disajikan pada Tabel VI.B.4.

Tabel VI.B.4. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah/Biji Berminyak Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Kacang Tanah	557,3	45,1	512,2	0,2	0,7
2.	Kacang Kedelai	27.398,1	1.493,5	25.904,6	12,2	33,4
3.	Kacang Hijau	1.331,0	93,2	1.237,8	0,6	1,6
4.	Kelapa Berkulit	1.558,9	155,9	1.403,0	0,7	1,8

Total ketersediaan pangan kelompok buah/biji berminyak di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 yang paling dominan adalah kacang kedelai yang mencapai sekitar 25,904 ton atau

sekitar 12,2 kg/kapita per tahun. Sementara itu tingkat ketersediaan untuk kelompok buah/biji berminyak lainnya yaitu kacang tanah, kacang hijau dan kelapa berkulit relatif sangat sedikit dengan tingkat ketersediaan hanya mencapai kurang dari 1 kg/kapita/tahun.

## 5. Buah-buahan

Data ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 untuk kelompok pangan buah-buahan disajikan pada Tabel VI.B.5. Rata-rata ketersediaan pangan kelompok buah-buah yang paling dominan adalah pisang (31,146.8 ton atau 14.7 kg/kapita) dan jeruk (26,072.5 ton atau 12.3 kg/kapita).

Tabel VI.B.5. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Buah-Buahan Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Alpokat	6.036,2	603,6	5.432,5	2,6	7,0
2.	Jeruk	28.969,4	2.896,9	26.072,5	12,3	33,6
3.	D u k u	319,9	32,0	288,0	0,1	0,4
4.	Durian	936,7	93,7	843,0	0,4	1,1
5.	Jambu	8.812,3	881,2	7.931,1	3,7	10,2
6.	Mangga	13.367,6	1.336,8	12.030,9	5,7	15,5
7.	Nenas	1,0	0,1	0,9	0,0	0,0
8.	Pepaya	7.382,3	738,2	6.644,1	3,1	8,6
9.	Pisang	34.607,5	3.460,8	31.146,8	14,7	40,2
10.	Rambutan	1.689,3	168,9	1.520,4	0,7	2,0
11.	Salak	12.586,5	1.258,6	11.327,8	5,3	14,6
12.	Semangka	11.254,6	0,0	11.254,6	5,3	14,5
13.	Belimbing	2.015,3	201,5	1.813,8	0,9	2,3
14.	Apel	4.513,1	0,0	4.513,1	2,1	5,8
15.	Lainnya	12.244,7	1.224,5	11.020,3	5,2	14,2

Jenis buah-buahan lainnya yang tingkat ketersediaannya relatif signifikan dibandingkan yang lainnya adalah mangga (5,7 kg/kapita), salak (5,3 kg/kapita), semangka (5,3 kg/kapita), dan lainnya (5,2 kg/kapita). Sementara untuk komoditas buah-buahan lain seperti duku, durian, nenas, rambutan, dan belimbing tingkat ketersediaannya relatif sangat rendah (<1 kg/kapita per tahun).

## 6. Sayuran

Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VI.B.6 komoditas pangan kelompok sayuran yang tingkat ketersediaannya paling besar adalah cabai yaitu sekitar 28.772,9 ton (11,2 kg/kapita). Komoditas sayuran lain yang memiliki tingkat ketersediaan yang relatif signifikan adalah sawi sekitar 13.415,7 (6,3 kg/kapita). bayam sekitar 12.520,5 ton (5,9 kg/kapita), kangkung sekitar 12.404,9 ton (5,8 kg/kapita), dan bawang merah sekitar 9.912,6 (4,7 kg/kapita) per tahun.

Tabel VI.B.6. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Bawang Merah	11.014,0	1.101,4	9.912,6	4,7	12,8
2.	Bawang Putih	7.655,8	765,6	6.890,2	3,2	8,9
3.	Ketimun	8.501,4	854,4	7.647,0	3,6	9,9
4.	Kacang Panjang	5.240,2	524,0	4.716,2	2,2	6,1
5.	Tomat	1.218,2	121,8	1.096,4	0,5	1,4
6.	C a b a i	26.414,3	2.641,4	23.772,9	11,2	30,7
7.	Terung	5.316,3	531,6	4.784,7	2,3	6,2
8.	Sawi	14.906,3	1.490,6	13.415,7	6,3	17,3
9.	Kangkung	13.783,3	1.378,3	12.404,9	5,8	16,0
10.	Labu siam	5.377,3	537,7	4.839,5	2,3	6,2
11.	Buncis	3.723,6	372,4	3.351,3	1,6	4,3
12.	Bayam	13.912,7	1.392,1	12.520,5	5,9	16,2
13.	Sayuran lainnya	2.384,4	358,9	2.025,6	1,0	2,6

Komoditas lainnya seperti bawang bawang putih, ketimun, kacang panjang, tomat, terung, labu siam dan buncis tingkat ketersediaannya relatif lebih kecil. Sementara untuk tomat adalah komoditas sayur yang memiliki tingkat keterediaan paling rendah yaitu sekitar 1.096,4 ton (0,5 kg/kapita) per tahun. Kondisi tersebut di atas sudah barang tentu akan mempengaruhi kualitas ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok, mengingat pentingnya kelompok pangan sayur-sayuran sebagai sumber vitamin dan mineral, Mengenai keterkaitannya dengan kualitas ketersediaan pangan tersebut akan dibahas secara khusus pada sub-bab selanjutnya tentang analisis kualitas tingkat ketersediaan pangan berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok dengan pendekatan Pola Pangan Harapan (PPH).

## **7. Daging**

Pangan kelompok daging merupakan sumber protein hewani utama selain ikan, sehingga tingkat ketersediaanya akan sangat berpengaruh terhadap tingkat ketersediaan protein mapun kualitas ketersediaan pangan di suatu wilayah. Data ketersediaan pangan wilayah untuk kelompok daging di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok disajikan pada Tabel VI.B.7.

**Tabel VI.B.7. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Sayuran Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Daging Sapi	24.459,5	1.223,0	23.236,5	10,9	30,0
2.	Daging Kerbau	142,1	5,4	136,7	0,1	0,2
3.	Daging Kambing	1.114,0	36,5	1.077,6	0,5	1,4
4.	Daging Domba	343,3	17,2	326,2	0,2	0,4
5.	Ayam Buras	461,1	23,1	438,0	0,2	0,6
6.	Ayam Ras	45.275,5	2.263,8	43.011,8	20,3	55,5
7.	Daging Itik	843,8	42,2	801,6	0,4	1,0
8.	Jeroan Ternak	2.452,5	0,0	2.452,5	1,2	3,2

Sejalan dengan total penyediaan pangan komoditas kelompok daging maka daging ayam ras merupakan jenis komoditas kelompok daging yang memiliki tingkat ketersediaan yang paling tinggi dibandingkan jenis komoditas daging lainnya di Kota Depok, dimana tingkat ketersediaannya pada tahun 2023 mencapai sekitar 43.433,1 ton atau rata-rata sekitar 20,3 kg/kapita per tahun, diikuti oleh tingkat ketersediaan daging sapi sekitar 23.236,1 ton (10,5 kg/kapita). Sementara ketersediaan daging ruminansia lain daging kerbau, kambing, domba, dan kuda serta daging ayam buras dan daging itik ketersediaannya masih relatif rendah (<1 kg/kapita) per tahun.

## **8. Telur**

Dari 3 jenis pangan utama kelompok telur, berdasarkan data hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok maka telur ayam di wilayah Kota Depok, khususnya telur ayam, baik telur ayam ras maupun telur ayam buras, memiliki tingkat ketersediaan yang jauh lebih tinggi dibandingkan telur itik. Data yang disajikan pada Tabel VI.B.8 menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan telur ayam ras untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 mencapai sekitar 32.158,5 ton (15,1 kg/kapita) dan telur ayam buras yang mencapai

sekitar 1.143,1 ton (0,5 kg/kapita) per tahun. Sementara itu untuk telur telur itik tingkat ketersediaannya relatif sedikit dibandingkan telur ayam, yaitu hanya sekitar 1.121,1 ton (0,5 kg/kapita) per tahun.

**Tabel VI.B.8. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Telur Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Telur Ayam Buras	1.607,8	464,0	1.143,8	0,5	1,5
2.	Telur Ayam Ras	32.831,5	673,0	32.158,5	15,1	41,5
3.	Telur Itik	921,9	129,3	792,5	0,4	1,0

## **9. Susu**

Berdasarkan data hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok sebagaimana disajikan pada Tabel VI.B.9. tingkat ketersediaan susu sapi segar untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 hanya mencapai 1.131,6 ton yang berarti rata-rata hanya sekitar 0,9 kg/kapita per tahun. Sementara untuk produk susu impor, ketersediaannya mencapai sekitar 15.297,8 ton atau rata-rata sekitar 11,9 kg/kapita per tahun.

**Tabel VI.B.9. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Susu Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Susu Sapi	1.200,0	68,4	1.131,6	0,9	2,4
2.	Susu Impor	16.222,5	924,7	15.297,8	11,9	32,5

## **10. Ikan**

Data ketersediaan pangan wilayah untuk kelompok ikan di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok disajikan pada Tabel VI.B.10. Pangan kelompok ikan yang jumlah ketersediaannya cukup signifikan pada tahun 2023 adalah ikan tongkol sekitar 6.736,1 (3,2 kg/kapita), kembung sekitar 9.693 (4,6 kg/kapita), bandeng sekitar 2.623,3 ton (1,2 kg/kapita), mujair sekitar 5.350,3 ton

(2,5 kg/kapita), ikan mas sekitar 9.216,0 (4,3 kg/kapita), dan ikan lainnya 15.552,0 ton (7,3 kg/kapita) per tahun.

Tabel VI.B.10. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Ikan Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Tongkol	6.964,3	1.044,6	5.919,6	2,8	7,6
2.	Kakap	971,2	145,7	825,5	0,4	1,1
3.	Bawal	521,4	78,2	443,2	0,2	0,6
4.	Teri	450,3	67,5	382,7	0,2	0,5
5.	Kembung	11.404,6	1.710,7	9.693,9	4,6	12,5
6.	Tenggiri	467,4	70,1	397,3	0,2	0,5
7.	Bandeng	3.086,3	462,9	2.623,3	1,2	3,4
8.	Mujair	6.294,5	944,2	5.350,3	2,5	6,9
9.	Ikan mas	10.842,4	1.626,4	9.216,0	4,3	11,9
10.	Udang	2.721,6	408,2	2.313,4	1,1	3,0
11.	Kepiting	0,8	0,1	0,6	0,0	0,0
12.	Kerang darah	326,9	49,0	277,9	0,1	0,4
13.	Cumi-cumi	1.721,6	258,2	1.463,4	0,7	1,9
14.	Lainnya	18.273,0	2.740,9	15.532,0	7,3	20,0

Sementara untuk ikan lainnya seperti kakap, bawal, tenggiri, bandeng, belanak, kepiting, dan kerang darah tingkat ketersediaanya relatif kecil dibandingkan jenis komoditas kelompok ikan yang telah disebutkan sebelumnya. Tingkat ketersediaan jenis-jenis ikan tersebut rata-rata kurang dari 1 kg/kapita per tahun.

## 11. Minyak dan Lemak

Data ketersediaan pangan wilayah untuk kelompok minyak dan lemak di wilayah Kota Depok berdasarkan hasil perhitungan NBM tahun 2023 disajikan pada Tabel VI.B.11. Sejalan dengan total ketersediaannya, maka ketersediaan pangan kelompok minyak dan lemak sebagian besar dalam bentuk minyak sawit, yaitu sekitar 38,138,2 (18,0 kg/kapita) per tahun. Sementara tingkat ketersediaan minyak kelapa dan lemak relatif kecil dibandingkan dengan tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit.

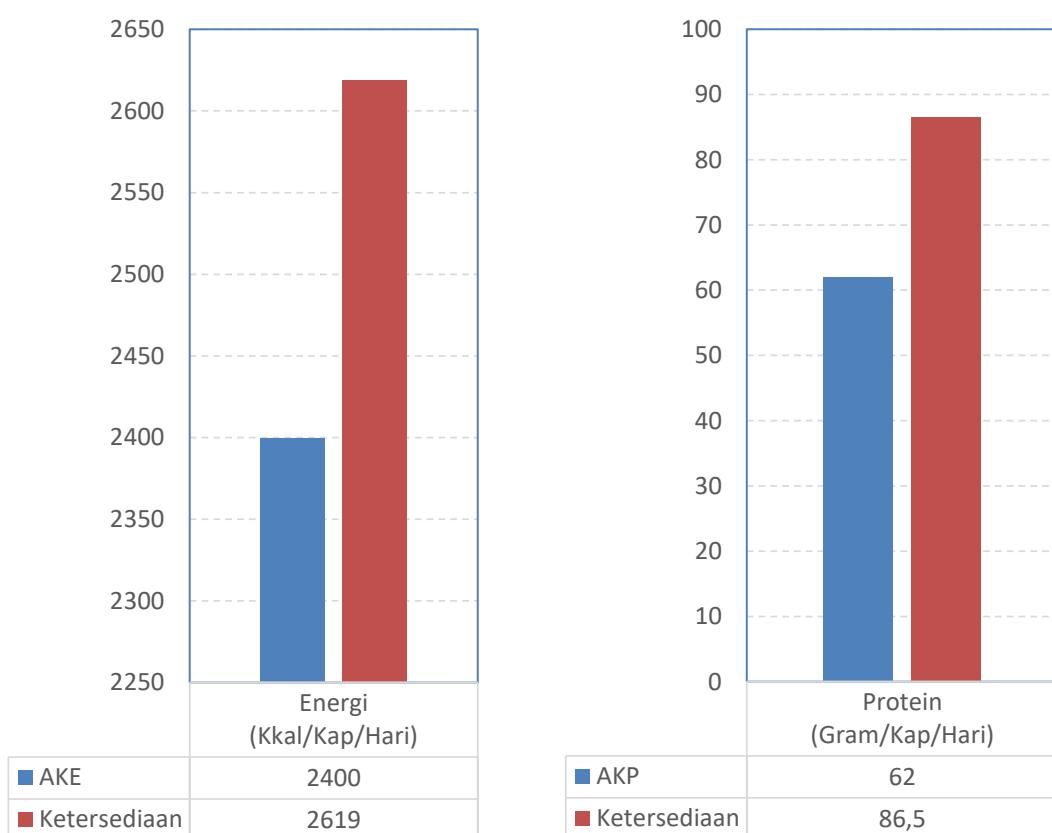
Tabel VI.B.11. Rata-Rata Ketersediaan Pangan Kelompok Minyak dan Lemak Untuk Konsumsi Penduduk di Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Jenis Pangan	Penyediaan (Ton/Tahun)	Ketersediaan (Ton/Tahun)		Ketersediaan Per Kapita	
			Non Konsumsi	Konsumsi	Kg/Tahun	Gram/Hari
1.	Minyak Kelapa	169,3	2,6	166,7	0,1	0,2
2.	Minyak Sawit	38.739,0	600,5	38.138,6	18,0	49,2
3.	Lemak Sapi	250,1	3,7	246,4	0,1	0,3
4.	Lemak Kerbau	1,5	0,1	1,5	0,0	0,0
5.	Lemak Kambing	12,3	0,1	12,2	0,0	0,0
6.	Lemak Domba	3,8	0,1	3,8	0,0	0,0

## VII. KUALITAS KETERSEDIAAN PANGAN

### A. Ketersediaan Energi dan Protein

Berbagai upaya perbaikan dan penanggulangan dampak krisis ekonomi telah dilakukan pemerintah Indonesia melalui program pembangunan di berbagai bidang, termasuk program pembangunan bidang ketahanan pangan. Terlepas dari masih adanya kekurangan dan kelemahan dalam pelaksanaan program pembangunan, berbagai upaya perbaikan tersebut telah berhasil memperbaiki kembali kondisi ketahanan pangan penduduk Indonesia, khususnya di Kota Depok. Hasil analisis ketersediaan pangan berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Depok, secara umum menunjukkan bahwa tingkat ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok telah melebihi Angka Kecukupan Gizi (AKG) yang dianjurkan.



Gambar VII.A.1. Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

Data yang disajikan pada Gambar VII.A.1 menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 adalah sekitar 2.619 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berarti Tingkat Ketersediaan Energi (TKE) di

wilayah Kota Depok telah mencapai sekitar 109,1% AKE pada tahun 2023. Sementara itu, ketersediaan protein telah mencapai sebesar 86,5 gram/kapita/hari sehingga Tingkat Ketersediaan Protein (TKP) di wilayah Kota Depok telah mencapai 139,4% AKP. Tingkat kecukupan ketersediaan Energi dan Protein untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk berdasarkan Neraca Bahan Makanan di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 disajikan pada Tabel VII.A.1.

Tabel VII.A.1. Tingkat Kecukupan Ketersediaan Energi dan Protein Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Komponen Gizi	Tingkat Kecukupan Ketersediaan		
		Ketersediaan	Kecukupan	%AKG
1.	Energi (kkal/kapita/hari)	2.619	2.400	109,1
	Protein (gram/kapita/hari)	86,5	62	139,4

Meskipun secara kuantitas tingkat ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok telah melebihi angka kecukupan gizi yang dianjurkan, namun perlu dikaji lebih mendalam kualitasnya berdasarkan kontribusi energi masing-masing kelompok pangan maupun berdasarkan skor Pola Pangan Harapan. Secara umum, data yang disajikan pada Tabel VII.A.2 menunjukkan bahwa kelompok pangan padi-padian masih menjadi penyumbang energi terbesar terhadap ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok. Pada tahun 2023, sekitar 1.378 kkal energi (57,4% AKE) bersumber dari pangan kelompok padi-padian.

Tabel VII.A.2. Jumlah dan Kontribusi Ketersediaan Energi dan Protein Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Data Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Kelompok Pangan	Ketersediaan Energi Per Hari		Ketersediaan Protein Per Hari	
		Kkal/Kap	%AKE*)	Gram/Kap	%AKP**)
1.	Padi-padian	1.378	57,4	34,4	55,5
2.	Umbi-umbian	91	3,8	0,8	1,2
3.	Pangan Hewani	375	15,6	33,6	54,2
4.	Minyak dan Lemak	444	18,5	0,0	0,0
5.	Buah/Biji Berminyak	3	0,1	0,0	0,1
6.	Kacang-kacangan	134	5,6	13,9	22,3
7.	Gula	65	2,7	0,0	0,0
8.	Sayur dan Buah	128	5,3	3,8	6,1
9.	Lain-lain	-	0,0	-	0,0
Total		2.619	109,1	86,5	139,4

Keterangan : \*) Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 kkal/kapita/hari;

\*\*) Standar Angka Kecukupan Protein (AKP) = 62 gram/kapita/hari

Penyumbang ketersediaan energi lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kelompok minyak dan lemak, dan pangan hewani dimana pada tahun 2023 kontribusi energi untuk masing-masing kelompok pangan tersebut berturut-turut mencapai sekitar 375 kkal (15,6% AKE), dan 444 (18,5% AKE). Sementara itu, kelompok pangan seperti umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, gula, dan lain-lain hanya menyumbang masing-masing kurang dari 4% terhadap total ketersediaan energi.

Sejalan dengan ketersediaan energi, kelompok pangan pangan hewani dan padi-padian merupakan penyumbang terbesar terhadap ketersediaan protein di wilayah Kota Depok. Pada tahun 2023, sebagian besar protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kota Depok bersumber dari kelompok padi-padian yaitu sekitar 34,4 gram protein (55,5% AKP) dan kelompok pangan hewani sekitar 33,6 gram protein (54,2% AKP). Penyumbang ketersediaan protein lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kacang-kacangan yaitu sekitar 13,9 gram (22,3% AKP). Sementara itu, kelompok pangan lainnya seperti kelompok umbi-umbian, minyak dan lemak, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta pangan lain-lain kontribusinya relatif kecil dimana hanya menyumbang masing-masing kurang dari 10% AKP.

## B. Skor Pola Pangan Harapan

Analisis situasi ketersediaan pangan penduduk di suatu wilayah dalam rangka mengkaji pencapaian sasaran pembangunan ketahanan pangan tidak hanya cukup ditunjukkan oleh adanya peningkatan kuantitas ketersediaan pangan, tetapi juga perlu analisis lebih lanjut terhadap aspek kualitas ketersediaannya, khususnya dinilai dari aspek komposisi atau keragaman dan mutu gizi konsumsi pangan. Data yang disajikan pada Tabel VII.C.3 menyajikan gambaran tentang tingkat dan gap kecukupan ketersediaan masing-masing kelompok pangan terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional untuk tingkat ketersediaan sebesar 2.400 kkal/kapita/hari.

Berdasarkan standar PPH Nasional, kontribusi energi terhadap Angka Kecukupan Energi (AKE) yang ideal untuk masing-masing kelompok pangan adalah sebagai berikut : 50% padi-padian, 6% umbi-umbian, 12% pangan hewani, 10% minyak dan lemak, 3% buah/biji berminyak, 5% kacang-kacangan, 5% gula, 6% sayur dan buah, dan 4% lain-lain. Jika dibandingkan dengan standar PPH tersebut maka sudah dapat dipastikan terdapat kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya jauh melebihi angka yang dianjurkan dan terdapat pula kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya masih kurang dari angka yang dianjurkan. Berdasarkan data yang disajikan pada Tabel VII.B.1, kelompok pangan yang ketersediaannya telah melebihi angka kecukupannya adalah pangan kelompok padi-padian

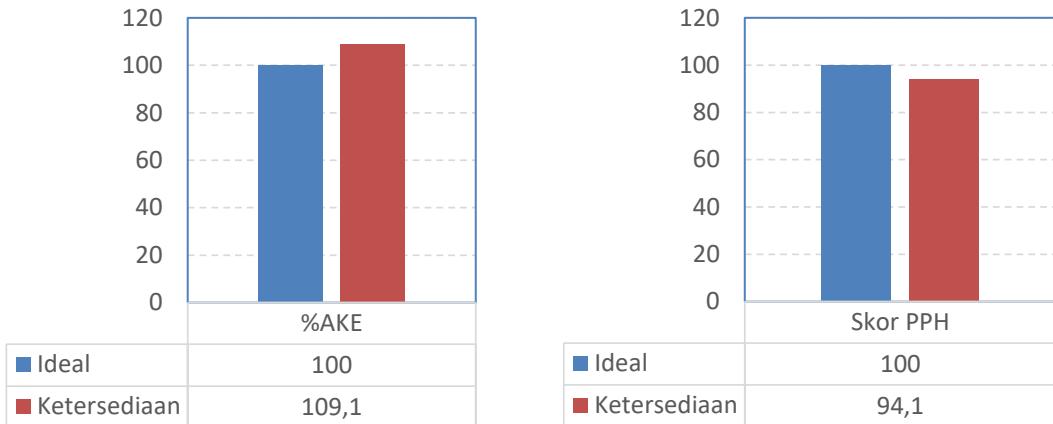
(lebih 1311 kkal atau 54,1% AKE), pangan hewani (370 kkal atau 15,4% AKE, minyak dan lemak (lebih 240 kkal atau 18,3% AKE), dan kacang-kacangan (125 kkal atau 5,2% AKE). Adapun kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain ketersediaanya masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan, dimana masing-masing masih kekurangan sekitar 65 kkal, 71 kkal, 44 kkal, 20 kkal, dan 42 kkal per kapita/hari. Tabel VII.B.2 menyajikan ringkasan hasil analisis kualitas ketersediaan pangan berdasarkan PPH di wilayah Kota Depok selama tahun 2023.

**Tabel VII.B.1. Jumlah, Kontribusi dan Gap Ketersediaan Energi Menurut Kelompok Pangan Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok**

No	Kelompok Pangan	Kkal/kapita/hari		% AKE		Gap Ketersediaan	
		Aktual	Standar	Aktual	Standar	Kkal	% AKE
1.	Padi-padian	1.378	1.200	57,4	50,0	178	7,4
2.	Umbi-umbian	91	144	3,8	6,0	-53	-2,2
3.	Pangan Hewani	375	288	15,6	12,0	87	3,6
4.	Minyak dan Lemak	444	240	18,5	10,0	204	8,5
5.	Buah/Biji Berminyak	3	72	0,1	3,0	-69	-2,9
6.	Kacang-kacangan	134	120	5,6	5,0	14	0,6
7.	Gula	65	120	2,7	5,0	-55	-2,3
8.	Sayur dan Buah	128	144	5,3	6,0	-16	-0,7
9.	Lain-lain	-	72	0,0	3,0	-72	-3,0
Total		2.619	2.400	109,1	100,0	219	9,1

*Keterangan : \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 Kkal/kapita/hari*

Secara umum, hasil analisis kualitas ketersediaan pangan yang disajikan diatas juga menunjukkan bahwa meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Depok telah melebih angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Sebagaimana disajikan pada Gambar VII.B.1 skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan di wilayah di Kota Depok berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok baru mencapai 94,1 atau kurang 5,6 poin dari skor PPH ideal 100.



Gambar VII.B.1. Tingkat Kecukupan Energi dan Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Wilayah Kota Depok Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok.

Sejalan dengan hasil analisis kualitas ketersediaan pangan berdasarkan kontribusi energi dari masing-masing kelompok pangan terhadap AKE, maka sebagian kelompok pangan telah mencapai atau bahkan melebihi skor PPH maksimal yang harus dicapai, sementara skor PPH kelompok pangan lainnya masih dibawah skor ideal. Kelompok pangan yang sudah mencapai skor PPH maksimal yang harus dicapai adalah kelompok padi-padian, pangan hewani, minyak dan lemak, serta kacang-kacangan. Sementara kelompok pangan yang belum mencapai skor PPH maksimal adalah kelompok kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta kelompok lain-lain.

Tabel VII.B.2. Skor Pola Pangan Harapan Ketersediaan Pangan Wilayah Berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Energi Per Kapita/Hari		Standar PPH**)		Capaian	
		Kalori	%AKE	Bobot	Kalori	%AKE	Bobot
1.	Padi-padian	1.378	57,4	0,5	25,0	28,7	25,0
2.	Umbi-umbian	91	3,8	0,5	2,5	1,9	1,9
3.	Pangan Hewani	375	15,6	2,0	24,0	31,2	24,0
4.	Minyak dan Lemak	444	18,5	0,5	5,0	9,2	5,0
5.	Buah/Biji Berminyak	3	0,1	0,5	1,0	0,1	0,1
6.	Kacang-kacangan	134	5,6	2,0	10,0	11,2	10,0
7.	Gula	65	2,7	0,5	2,5	1,4	1,4
8.	Sayur dan Buah	128	5,3	5,0	30,0	26,7	26,7
9.	Lain-lain	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total		2.619	109,1		100,0		94,1

Keterangan : \*) Angka Kecukupan Energi (AKE) = 2.400 Kkal/kapita/hari; \*\*) Standar Nasional

## VIII. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Secara umum berdasarkan data Neraca Bahan Makanan Kota Depok, sebagian besar pangan yang tersedia untuk dikonsumsi penduduk di wilayah Kota Depok diperoleh dari pasokan dari luar daerah. Estimasi volume total penyediaan pangan di wilayah Kota Depok tahun 2023 mencapai lebih dari 900.000 ton yang sebagian besar penyediaannya tergantung pasokan dari luar wilayah (96,5%).

Komoditas utama pangan kelompok padi-padian adalah beras dengan total ketersediaan mencapai 242.221,9 ton (114,1 kg/kapita) per tahun. Ubi kayu adalah kelompok komoditas makanan berpati yang paling dominan ketersediaannya yaitu sekitar 40.873,4 ton (19,2 kg/kapita) per tahun. Ketersediaan gula pasir mencapai 12.522,7 ton (5,9 kg/kapita) per tahun. Sementara itu, ketersediaan pangan kelompok buah/biji berminyak yang paling dominan adalah kacang kedelai yang mencapai sekitar 25.904,6 ton (12,2 kg/kapita) per tahun. Rata-rata ketersediaan pangan kelompok buah-buahan yang paling banyak ketersediaannya adalah pisang (31.146,8 ton atau sekitar 17,7 kg/kapita), dan jeruk (26.072,5 ton atau sekitar 12,3 kg/kapita). Adapun komoditas pangan kelompok sayuran yang tingkat ketersediaannya paling besar adalah cabai yaitu sekitar 28.772,9 ton (11,2 kg/kapita). Komoditas sayuran lain yang memiliki tingkat ketersediaan yang relatif signifikan adalah sawi sekitar 13.415,7 ton (6,3 kg/kapita), bayam sekitar 12.520,5 ton (5,9 kg/kapita), kangkung sekitar 12.404,9 ton (5,8 kg/kapita), dan bawang merah sekitar 9.912,6 (4,7 kg/kapita) per tahun.

Komoditas kelompok daging dengan tingkat ketersediaan paling tinggi di Kota Depok adalah daging ayam ras yaitu sekitar 43.011,1 ton (20,3 kg/kapita) per tahun dan daging sapi sekitar 23.236 ton (10,9 kg/kapita) per tahun. Tingkat ketersediaan telur ayam ras untuk konsumsi penduduk di wilayah Kota Depok pada tahun 2023 mencapai sekitar 32.158,5 ton (15,1 kg/kapita). Sementara itu, produk susu impor ketersediaannya mencapai 15.297,8 ton atau rata-rata sekitar 11,9 kg/kapita per tahun.

Pangan kelompok ikan yang jumlah ketersediaannya cukup signifikan pada tahun 2023 adalah ikan tongkol yang mencapai sekitar 6.736,1 (3,2 kg/kapita), kembung sekitar 9.693 (4,6 kg/kapita), bandeng sekitar 2.623,3 ton (1,2 kg/kapita), mujair sekitar 5.350,3 ton (2,5 kg/kapita), ikan mas sekitar 9.216,0 (4,3 kg/kapita), dan ikan lainnya sekitar 15.552,0 ton (7,3 kg/kapita) per tahun. Ketersediaan pangan kelompok minyak dan lemak sebagian besar dalam bentuk minyak sawit, yaitu sekitar 38.138,2 (18,0 kg/kapita) per tahun. Sementara tingkat ketersediaan minyak kelapa dan lemak relatif kecil dibandingkan dengan tingkat ketersediaan minyak kelapa sawit.

Hasil analisis menunjukkan bahwa rata-rata ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan penduduk di Kota Depok pada tahun 2023 adalah sekitar 2.619 kkal/kapita/hari. Jika dibandingkan dengan Angka Kecukupan Energi (AKE) yang dianjurkan secara nasional berarti Tingkat Ketersediaan Energi (TKE) di Kota Depok mencapai sekitar 109,1% AKE pada tahun 2023. Sementara itu, ketersediaan protein mencapai sebesar 86,5 gram/kapita/hari sehingga Tingkat Ketersediaan Protein (TKP) di Kota Depok telah mencapai 139,4% AKP.

Kelompok pangan padi-padian masih menjadi penyumbang energi terbesar terhadap ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok, yaitu sekitar 1.378 kkal energi (57,4% AKE). Penyumbang ketersediaan energi lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kelompok minyak dan lemak, dan kelompok pangan hewani. Dimana pada tahun 2023 kontribusi energi masing-masing kelompok pangan tersebut berturut-turut mencapai sekitar 375 kkal (15,6% AKE), dan 444 (18,5% AKE). Sejalan dengan ketersediaan energi, kelompok pangan pangan hewani dan padi-padian merupakan penyumbang terbesar terhadap ketersediaan protein di wilayah Kota Depok. Pada tahun 2023, sebagian besar protein yang tersedia untuk dikonsumsi oleh penduduk di Kota Depok bersumber dari kelompok padi-padian yaitu sekitar 34,4 gram protein (55,5% AKP) dan kekompok pangan hewani sekitar 33,6 gram protein (54,2% AKP). Penyumbang ketersediaan protein lainnya yang cukup signifikan kontribusinya adalah kacang-kacangan yaitu sekitar 13,9 gram (22,3 %AKP).

Kelompok pangan yang ketersediaannya telah melebihi angka kecukupannya adalah pangan kelompok padi-padian (lebih 1311 kkal atau 54,1 %AKE), pangan hewani (370 kkal atau 15,4 %AKE, minyak dan lemak (lebih 240 kkal atau 18,3 %AKE), dan kacang-kacangan (125 kkal atau 5,2 %AKE). Adapun kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, gula, sayur dan buah serta lain-lain ketersediaanya masih dibawah angka kecukupan yang dianjurkan, dimana masih terdapat kekurangan masing-masing sekitar 65 kkal, 71 kkal, 44 kkal, 20 kkal, dan 42 kkal per kapita/hari.

Secara umum, hasil analisis kualitas ketersediaan pangan menunjukkan bahwa meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Depok telah melebih angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Oleh karena itu, meskipun kuantitas ketersediaan pangan berdasarkan tingkat ketersediaan energi dan protein di wilayah Kota Depok telah melebih angka kecukupan yang dianjurkan, kualitas ketersediaan pangannya belum mencapai pola pangan ideal. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) ketersediaan pangan di wilayah di Kota Depok pada tahun 2023 baru mencapai 94,1 atau kurang 5,6 poin dari skor PPH ideal 100.

## B. Saran

Tingginya tingkat penyediaan pangan di suatu wilayah tidak dapat menjadi ukuran terjaminnya ketersediaan pangan untuk konsumsi penduduk. Pola penanganan dan penggunaan pangan di suatu wilayah sejak pasca panen sampai siap dikonsumsi oleh masyarakat konsumen sangat menentukan tingkat ketersediaan pangan. Berdasarkan tingkat ketersediaan pangan wilayah Kota Depok Tahun 2023, baik dari segi kuantitas ketersediaan energi dan protein serta kontribusi masing-masing kelompok pangan maupun skor PPH, menunjukkan bahwa kuantitas ketersediaan pangan yang tinggi di Kota Depok tidak menjadi jaminan baiknya kualitas ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi penduduk. Oleh karena itu, selain mempertahankan tingkat ketersediaan pangan yang sudah dicapai, ketersediaan pangan di wilayah Kota Depok masih perlu ditingkatkan keragamannya.

Jenis-jenis komoditas pangan yang masih perlu ditingkatkan jumlah dan kontribusinya adalah kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, serta sayur dan buah. Jika dikaitkan dengan ketergantungan wilayah terhadap pangan impor untuk kelompok komoditas tersebut yang relatif lebih rendah, khususnya kelompok umbi-umbian dan kacang-kacangan, maka peningkatan ketersediaan kelompok pangan tersebut masih dimungkinkan. Upaya peningkatan penyediaan pangan yang bersumber dari produksi merupakan alternatif strategis yang dapat ditempuh di wilayah Kota Depok, mengingat masih cukup tingginya potensi sumberdaya alam untuk pengembangan pertanian, peternakan dan perikanan di wilayah Kota Depok.

Tingginya tingkat ketergantungan ketersediaan energi terhadap pangan kelompok padi-padian, khususnya tepung terigu, dan juga kelompok susu akan menjadi beban perekonomian yang cukup berat bagi wilayah Kota Depok dalam upaya penyediaan pangan, karena tingkat ketergantungan impor untuk kelompok pangan tersebut sangat tinggi. Pengadaan pangan melalui impor dari wilayah lain atau bahkan luar negeri menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan penduduk di wilayah Kota Depok. Oleh karena itu, kebijakan dan program yang terkait dengan penyediaan, pemasaran, dan distribusi pangan di dalam maupun dari dan ke luar wilayah Kota Depok harus mendapat perhatian yang serius untuk meningkatkan dan mempertahankan kestabilan ketersediaan pangan wilayah di Kota Depok.

Melalui program penguatan kapasitas dan kualitas sarana dan prasarana penyimpanan dan distribusi pangan diharapkan dapat menekan tingkat kehilangan pangan akibat tercecer dan rusak selama penyimpanan dan pendistribusian, sehingga sedikit banyak akan meningkatkan ketersediaan pangan untuk kebutuhan konsumsi. Tingkat ketergantungan yang tinggi suatu wilayah terhadap pangan impor secara konseptual tidak menjadi masalah

asalkan : (1) PAD yang digunakan untuk mengimpor cukup memadai, (2) analisis secara teknis dan ekonomis untuk wilayah tersebut lebih baik impor daripada produksi, dan (3) ketersediaan pangan tersebut di pasar regional atau nasional terjamin. Untuk kasus Kota Depok, ketergantungan pangan terhadap impor nampaknya bukan menjadi masalah utama. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa (1) secara teknis dan ekonomis wilayah Kota Depok kurang layak untuk melakukan kegiatan produksi pangan, khususnya komoditas pangan dimana lahan pertanian menjadi faktor utama produksi (2) sumberdaya atau pendapatan daerah yang tersedia untuk mengimpor pangan relatif memadai, dan (3) kebutuhan pangan di wilayah Kota Depok sebagai permintaan pasar bagi wilayah-wilayah lain yang menjadi sentra produksi pangan merupakan potensi investasi daerah di bidang agribisnis.

Strategi lain yang dapat dapat ditempuh adalah dengan perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat agar secara bertahap dapat menyesuaikan dengan standar PPH yang dianjurkan. Sejalan dengan perbaikan pola konsumsi, maka penyediaan kelompok pangan yang tingkat ketersediaannya sudah jauh melebihi angka yang dianjurkan dapat diturunkan secara bertahap pula. Namun demikian, penurunan ketersediaan kelompok pangan tersebut harus pula diimbangi pula dengan peningkatan ketersediaan pangan kelompok yang kontribusinya masih rendah, khususnya untuk kelompok umbi-umbian, buah/biji berminyak, kacang-kacangan, serta buah dan saur-sayuran.

Demikian hasil analisis situasi ketersediaan pangan wilayah berdasarkan Neraca Bahan Makanan Kota Depok Tahun 2003 telah disusun dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan program bidang ketahanan pangan di Kota Depok di masa yang akan datang. Agar data dan informasi yang disajikan melalui analisis tersebut memiliki relevansi dan akurasi yang memadai untuk penyusunan kebijakan dan perencanaan program ketahanan pangan di Kota Depok, maka kegiatan analisis harus dilaksanakan secara reguler dan lebih komprehensif setiap tahunnya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Badan Pangan Nasional, 2023. Panduan Neraca Bahan Makanan Nasional 2023. Direktorat Ketersediaan Pangan, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan, Badan Pangan Nasional. Jakarta.
- Badan Pangan Nasional, 2023. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pola Pangan Harapan. Badan Pangan Nasional. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2024. Kota Depok Dalam Angka Tahun 2024. Badan Pusat Statistik Kota Depok, Depok.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2023. Statistik Daerah Kota Depok Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Depok, Depok.
- Badan Pusat Statistik Kota Depok, 2023. Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Depok Tahun 2023. Badan Pusat Statistik Kota Depok, Depok.
- Pemerintah Kota Depok, 2021. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2021-2026. Pemerintah Kota Depok. Depok.
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. 2022. Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2021-2026. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Depok.
- Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. 2024. Laporan Kinerja Intansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok Tahun 2023. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Depok. Depok.

## LAMPIRAN

Lampiran 1. Tabel Perhitungan Neraca Bahan Makanan Kota Depok

Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2023  
Mid Year Population 2.145.400 Jiwa

Jenis Bahan Makanan  Commodity	Produksi Production				Penyediaan Provinsi sbl. Provinsi				Penyediaan Ekspor Supply				Pemakaian dalam kabupaten/kota Regencial Utilization (Ton)				Ketersediaan untuk konsumsi per kapita Per Capita Consumption Availability						
	Masukan Input		Perubah- an Stok Changes in Stock		Impor Imports		Ekspor Exports		Availabile Available		Availabile Available		Pakan Feed	Bitit Seed	Dilolah untuk Manufacture for Makanan Food		Yang Bukan Bahan Food	Makanan Waste	kg/thn kg/year	gram/ hari gram/ day	Energi kal/hari cal/day	Protein gram/day	Lemak Fats gram/day
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)				
<b>I . PADI-PADIAN /CEREALS</b>																							
1 . Padi gagang Kering Giling /Dry stalk paddy /unhusked rice	-	385.7	0.0	0.0	385.7	0.0	385.7	4.4	24.3	343.5	1.2	12.2	0.00	-	-	-	-	-					
2 . Gabah Krg Giling / Beras/ Unhusked rice / Rice	343.5	217.4	0.0	250.343.5	250.560.9	0.0	250.560.9	425.7	0.0	0.0	1,652.8	6.260.4	242.221.94	112.90	309	1.122.8	27.5	4.3					
3 . Jagung /Maize	-	0.0	0.0	2.702.6	2.702.6	0.0	2.702.6	162.8	1.0	0.0	543.2	135.7	1.859.95	0.87	2	7.6	0.2	0.1					
4 . Jagung basah/Fresh Maize	10.2	26.3	0.0	0.0	26.3	0.0	26.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	26.25	0.01	0	0.0	0.0	0.0					
5 . Gandum/Wheat	-	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-	-	-	-	-					
6 . Tepung gandum/ Wheat Flour	0.0	0.0	0.0	58.485.4	58.485.4	0.0	58.485.4	0.0	0.0	0.0	111.1	169.6	58.204.73	27.13	74	247.5	6.7	0.7					
																1,378.0	34.4	5.2					
<b>II . MAKANAN BERPATI /STARCHY FOOD</b>																							
1 . Ubi Jalar / Sweet potatoes	-	29.8	0.0	10.597.7	10.627.5	0.0	10.627.5	0.0	0.0	0.0	17.6	267.3	10.342.54	4.82	13	16.5	0.2	0.0					
2 . Ubi Kayu /Cassava	-	605.7	0.0	42.038.9	42.644.6	0.0	42.644.6	0.0	0.0	0.0	1,090.8	665.8	40.887.97	19.06	52	68.3	0.4	0.1					
3 . Ubi kayu/Gaplek/Cassava/Manioc	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-					
4 . Ubi kayu/Tapioka/Cassava/Tapioca	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-					
5 . Sagu / Tepung Sagu/ Sagopith / Sago flour	-	0.0	0.0	748.8	748.8	0.0	748.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	748.82	0.35	1	2.0	0.0	0.0					
																86.9	0.6	0.2					
<b>III . GULA/SUGAR</b>																							
1 . Gula Pasir / Refined Sugar	-	0.0	0.0	12.658.2	12.658.2	0.0	12.658.2	0.0	0.0	0.0	11.4	124.1	12.522.71	5.84	16	58.2	-	-					
2 . Gula merah/Brown sugar	-	0.0	0.0	1,441.6	1,441.6	0.0	1,441.6	0.0	0.0	0.0	1.3	0.0	1,440.26	0.67	2	6.8	0.0	0.1					
																65.0	0.0	0.1					
<b>IV . BUAH/BUJI BERMINYAK /PULSES NUT dan OIL SEEDS</b>																							
1 . Kacang Tanah Berkulit /Groundnuts in shell	-	19.8	0.0	0.0	19.8	0.0	19.8	0.0	0.0	18.8	0.0	1.0	0.00	-	-	-	-	-					
2 . Kacang Tanah Lepas Kulit /Groundnuts in shelled	18.8	11.3	0.0	546.1	557.3	0.0	557.3	0.0	4.2	0.0	13.1	27.9	512.20	0.24	1	3.0	0.2	0.3					
3 . Kedelai /Soybeans	-	0.0	0.0	27.398.1	27.398.1	0.0	27.398.1	109.9	0.0	0.0	13.7	1.369.9	25.904.64	12.07	33	126.0	13.4	5.5					
4 . Kacang Hijau /Greenpeas	-	0.0	0.0	1,331.0	1,331.0	0.0	1,331.0	26.6	0.0	0.0	0.0	66.6	1,237.85	0.58	2	5.3	0.3	0.0					
5 . Kelapa Berkulit/ daging /Coconut in husk /Coconut meat	0.0	0.0	0.0	1,558.9	1,558.9	0.0	1,558.9	0.0	0.0	0.0	0.0	155.9	1,402.98	0.65	2	3.4	0.0	0.3					
6 . Kelapa Daging / Kopra/ Coconut meat / Copra	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-	-	-	-	-					
																137.7	13.9	6.2					

Jenis Bahan Makanan Commodity	Produksi Production			Penyediaan Provinsi sbl. Imports			Penyediaan Ekspor Exports			Penyediaan Provinsi Supply			Pemakaian dalam kabupaten/kota Regencial Utilization						Ketersediaan untuk konsumsi per kapita Per Capita Consumption Availability					
	Masukan Input		Perubah- an Stok Changes	Perubah- an Stok in Stock	Provinsi sbl. Imports	Ekspor Supply	Ekspor Exports	Provinsi Supply							Didlah untuk Pakan Feed	Bibit Seed	Makanan Food	Bukan Makanan Food	Makanan Non Food					
	Keluaran Output								Available			Available			Pakan Feed	Bibit Seed	Makanan Food	Bukan Makanan Food	Makanan Non Food					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)					
<b>V . BUAH-BUAHAN / FRUITS</b>																								
1 . Alpokat / Avocados	-	605.1	0.0	5,431.1	6,036.2	0.0	6,036.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	603.6	5,432.55	2.53	7	3.6	0.0	0.3					
2 . Jeruk / Oranges	-	71.4	0.0	28,898.0	28,969.4	0.0	28,969.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,896.9	26,072.45	12.15	33	10.4	0.2	0.0					
3 . D u k u / Lanzon	-	70.1	0.0	249.8	319.9	0.0	319.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	32.0	287.95	0.13	0	0.1	0.0	0.0					
4 . Durian / Durians	-	936.7	0.0	0.0	936.7	0.0	936.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	93.7	843.03	0.39	1	0.3	0.0	0.0					
5 . Jambu / Waterapples	-	6,326.5	0.0	2,485.8	8,812.3	0.0	8,812.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	881.2	7,931.05	3.70	10	4.1	0.1	0.0					
6 . Mangga / Mangoes	-	288.6	0.0	13,079.0	13,367.6	0.0	13,367.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,336.8	12,030.88	5.61	15	5.6	0.1	0.0					
7 . Nenas / Pineapples	-	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.90	0.00	0	0.0	0.0	0.0					
8 . Pepaya / Papayas	-	299.8	0.0	7,082.5	7,382.3	0.0	7,382.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	738.2	6,644.08	3.10	8	2.9	0.0	-					
9 . Pisang / Bananas	-	1,106.3	0.0	33,501.2	34,607.5	0.0	34,607.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3,460.8	31,146.77	14.52	40	28.5	0.3	0.1					
10 . Rambutan / Rambutans	-	1,689.3	0.0	0.0	1,689.3	0.0	1,689.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	168.9	1,520.37	0.71	2	0.5	0.0	0.0					
11 . Salak / Zalaka edulis	-	0.0	0.0	12,586.5	12,586.5	0.0	12,586.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,258.6	11,327.83	5.28	14	7.7	0.1	0.0					
12 . Sawo / Sapodila	-	11.5	0.0	0.0	11.5	0.0	11.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11.50	11,254.58	0.01	0	0.0	0.0	0.0					
13 . Semangka / Watermelon	-	0.0	0.0	11,254.6	11,254.6	0.0	11,254.6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	11,254.58	5.25	14	1.9	0.0	0.0					
14 . Belimbing / Starfruit	-	2,015.3	0.0	0.0	2,015.3	0.0	2,015.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	201.5	1,813.77	0.85	2	0.7	0.0	0.0				
15 . Manggis /	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-					
16 . Nangka / Cempedak	-	954.0	0.0	0.0	954.0	0.0	954.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	954.00	0.44	1	0.4	0.0	0.0					
17 . Markisa	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-					
18 . Sirsak	-	3.0	0.0	0.0	3.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.00	0.00	0	0.0	0.0	0.0					
19 . Sukun	-	5.4	0.0	0.0	5.4	0.0	5.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	5.40	0.00	0	0.0	0.0	0.0					
20 . Apel / Apple	-	0.0	0.0	4,513.1	4,513.1	0.0	4,513.1	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4,513.06	2.10	6	2.9	0.0	0.0					
21 . Anggur / Grape	-	55.0	0.0	0.0	55.0	0.0	55.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	55.00	0.03	0	0.0	0.0	0.0					
22 . Lainnya / Others	-	265.9	0.0	11,978.8	12,244.7	0.0	12,244.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,224.5	11,020.27	5.14	14	4.4	0.1	0.0				
																				74.2	0.9	0.6		
<b>VI . SAYURAN/VEGETABLES</b>																								
1 . Bawang Merah / Shallot	0.0	0.0	0.0	11,014.0	11,014.0	0.0	11,014.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,101.4	9,912.60	4.62	13	4.4	0.2	0.0					
2 . Ketimun / Cucumber	-	2.0	0.0	8,499.4	8,501.4	0.0	8,501.4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	4.3	850.1	7,647.03	3.56	10	0.4	0.0	0.0				
3 . Kacang Merah / Kidney Beans	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-					
4 . Kacang Panjang / Cow Peas	-	7.5	0.0	5,232.7	5,240.2	0.0	5,240.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	524.0	4,716.21	2.20	6	1.7	0.2	0.0					
5 . Kentang / Potatoes	-	0.0	0.0	7,655.8	7,655.8	0.0	7,655.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	765.6	6,890.23	3.21	9	4.6	0.2	0.0					
6 . Kol / Kubis / Cabbage	-	0.0	0.0	2,602.2	2,602.2	0.0	2,602.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	260.2	2,342.00	1.09	3	0.5	0.0	0.0					
7 . Tomat / Tomatoes	-	0.0	0.0	1,218.2	1,218.2	0.0	1,218.2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	121.8	1,096.36	0.51	1	0.3	0.0	0.0					
8 . Wortel / Carrots	-	0.0	0.0	6,053.7	6,053.7	0.0	6,053.7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	605.4	5,445.31	2.54	7	2.0	0.1	0.0				
9 . C a b e / Chilli	-	21.5	0.0	26,392.8	26,414.3	0.0	26,414.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,641.4	23,772.85	11.08	30	26.6	1.2	0.6					
10 . Terung / Eggplant	-	1.1	0.0	5,315.2	5,316.3	0.0	5,316.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	531.6	4,784.66	2.23	6	1.6	0.1	0.1					
11 . Petsai / sawi / Cabbage / Mustard GreensChinese Radish	-	203.6	0.0	14,702.7	14,906.3	0.0	14,906.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1,490.6	13,415.66	6.25	17	1.1	0.1	0.0					
12 . Bawang Daun /Spring Onions	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-					

Jenis Bahan Makanan Commodity	Produksi Production				Penyediaan Provision				Pemakaian dalam kabupaten/kota Regencial Utilization								Ketersediaan untuk konsumsi per kapita Per Capita Consumption Availability		
	Perubah- an Stok Changes		Impor Imports	Eksport Exports	Penyediaan Provision		(Ton)												
	Masukan Input	Keluaran Output	in Stock	Available	Available	Available	Pakan Feed	Bibit Seed	Ditolah untuk Manufacture for	Yang Tercecet	Bahan Makanan Food	kg/thn kg/year	gram/ hari gram/ day	Energi kal/hari cal/day	Protein gram/day	Lemak gram/day			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
13 . Kangkung / Swampcabbage	-	883.2	0.0	12,900.1	13,783.3	0.0	13,783.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,378.3	12,404.93	5.78	16	2.7	0.3	0.1	
14 . Lobak / Radish	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	-	-	-	-	
15 . Labu Siam /Pumpkin	-	0.0	0.0	5,377.3	5,377.3	0.0	5,377.3	0.0	0.0	0.0	0.0	537.7	4,839.53	2.26	6	1.2	0.0	0.0	
16 . Buncis / Greenbeans	-	0.0	0.0	3,723.6	3,723.6	0.0	3,723.6	0.0	0.0	0.0	0.0	372.4	3,351.27	1.56	4	1.3	0.1	0.0	
17 . Bayam / Spinach	-	371.9	0.0	13,540.8	13,912.7	0.0	13,912.7	0.0	0.9	0.0	0.0	1,391.3	12,520.54	5.84	16	1.8	0.1	0.0	
18 . Bawang Putih / Garlic	-	0.0	0.0	7,855.8	7,855.8	0.0	7,855.8	0.0	0.0	0.0	0.0	765.6	6,890.23	3.21	9	7.4	0.3	0.0	
19 . Kembang Kol	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	-	-	-	-	
20 . Jamur / Mushroom	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	-	-	-	-	
21 . Melinjo /	-	79.4	0.0	0.0	79.4	0.0	79.4	0.0	0.0	0.0	0.0	7.9	71.46	0.03	0	0.0	0.0	0.0	
22 . Petai /	-	0.5	0.0	0.0	0.5	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.45	0.00	0	0.0	0.0	0.0	
23 . Jengkol /	-	0.0	0.0	1,410.4	1,410.4	0.0	1,410.4	0.0	0.0	0.0	0.0	141.0	1,269.34	0.59	2	0.3	0.1	0.0	
24 . Sayuran lainnya/Others	-	34.7	0.0	2,349.7	2,384.4	0.0	2,384.4	0.0	0.0	119.2	1.2	238.4	2,025.57	0.94	3	0.7	0.1	0.0	
															58.7	3.0	1.0		
<b>VII . DAGING / MEAT</b>																			
1 . Daging Sapi / Beef Meat	8,338.0	6,670.4	0.0	17,789.1	24,459.5	0.0	24,459.5	0.0	0.0	0.0	0.0	1,223.0	23,236.49	10.83	30	61.4	5.6	4.2	
2 . Daging Kerbau / Buffalo Meat	51.5	39.1	0.0	103.0	142.1	0.0	142.1	0.0	0.0	0.0	0.0	5.4	136.69	0.06	0	0.1	0.0	0.0	
3 . Daging Kambing / Meat Goat	410.4	307.8	0.0	806.2	1,114.0	0.0	1,114.0	0.0	0.0	0.0	0.0	36.5	1,077.56	0.50	1	2.1	0.2	0.1	
4 . Daging Domba / Mutton Meat	128.3	93.6	0.0	249.7	343.3	0.0	343.3	0.0	0.0	0.0	0.0	17.2	326.18	0.15	0	0.9	0.1	0.1	
5 . Daging Kuda / Horse Meat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	-	-	-	-	
6 . Daging Babi / Pork Meat	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	-	-	-	-	
7 . Daging Ayam Buras /Local Chicken Meat	21.6	12.5	0.0	448.5	461.1	0.0	461.1	0.0	0.0	0.0	0.0	23.1	438.01	0.20	1	1.7	0.1	0.1	
8 . Daging Ayam Ras / Improved Chicken Meat	2,123.7	1,231.7	0.0	44,043.8	45,275.5	0.0	45,275.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2,263.8	43,011.76	20.05	55	165.9	10.0	13.7	
9 . Daging Itik / Duck Meat	38.3	23.0	0.0	820.9	843.8	0.0	843.8	0.0	0.0	0.0	0.0	42.2	801.63	0.37	1	3.3	0.2	0.3	
10 . Jeroan Semua Jenis /Offal All Kind	0.0	2,450.4	0.0	2.1	2,452.5	0.0	2,452.5	0.0	0.0	0.0	0.0	2,452.52	1.14	3	4.0	0.5	0.2		
															239.4	16.7	18.7		
<b>VIII . TELUR / EGGS</b>																			
1 . Telur Ayam Buras /Local Hen Eggs	-	45.0	0.0	1,562.8	1,607.8	0.0	1,607.8	0.0	402.0	0.0	0.0	62.1	1,143.79	0.53	1	2.5	0.2	0.2	
2 . Telur Ayam Ras /Improved Hen Eggs	-	1,252.0	0.0	31,579.5	32,831.5	0.0	32,831.5	0.0	0.0	0.0	0.0	673.0	32,158.49	14.99	41	56.3	4.5	3.9	
3 . Telur Itik / Duck Eggs	-	31.0	0.0	890.9	921.9	0.0	921.9	0.0	124.5	0.0	0.0	4.9	792.54	0.37	1	1.7	0.1	0.1	
															60.5	4.8	4.3		
<b>IX . SUSU / MILK</b>																			
1 . Susu Sapi / Cow Milk	-	1,200.0	0.0	0.0	1,200.0	0.0	1,200.0	0.0	0.0	0.0	0.0	68.4	1,131.60	0.53	1	0.9	0.0	0.1	
2 . Susu impor /Imported milk	-	0.0	0.0	16,222.5	16,222.5	0.0	16,222.5	0.0	0.0	0.0	0.0	924.7	15,297.80	7.13	20	11.9	0.6	0.7	
															12.8	0.7	0.7		
<b>X . IKAN / FISH</b>																			
1 . Tuna/Cakalang/Tongkol/Tunas/Skipjade/Eastern little	-	0.0	0.0	6,964.3	6,964.3	0.0	6,964.3	0.0	0.0	0.0	0.0	1,044.6	5,919.63	2.76	8	6.1	1.3	0.1	
2 . Kakapita/Giant seaperch	-	0.0	0.0	971.2	971.2	0.0	971.2	0.0	0.0	0.0	0.0	145.7	825.51	0.38	1	1.0	0.2	0.0	

Jenis Bahan Makanan Commodity	Produksi Production				Penyediaan Penyediaan				Pemakaian dalam kabupaten/kota Regencial Utilization						Ketersediaan untuk konsumsi per kapita Per Capita Consumption Availability						
	Masukan Input		Perubah- an Stok Changes		Provinsi sbl. Imports	Eksport Ekspor Supply	Provinsi Exports	Provinsi Supply	(Ton)			Didolah untuk Pakan Feed	Bibit Seed	Manufacture for Makanan Food	Yang Bukan Waste	Makanan Food	kg/thn kg/year	gram/ hari gram/ day	Energi kal/hari cal/day	Protein Proteins gram/day	Lemak Fats gram/day
	Keluaran Output		in Stock		Available before Export		Available														
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)		
3 . Cucut/Sharks	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-		
4 . Bawal/Pomfret	-	63.8	0.0	457.7	521.4	0.0	521.4	0.0	0.0	0.0	0.0	78.2	443.21	0.21	1	0.4	0.1	0.0			
5 . Teri/Anchovies	-	0.0	0.0	450.3	450.3	0.0	450.3	0.0	0.0	0.0	0.0	67.5	382.74	0.18	0	0.4	0.1	0.0			
6 . Lemuru/Indian oil sardinela	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-			
7 . Kembung/Indian mackerels	-	0.0	0.0	11,404.6	11,404.6	0.0	11,404.6	0.0	0.0	0.0	0.0	1,710.7	9,693.88	4.52	12	13.7	2.4	0.1			
8 . Tenggiri/Narrow bard king mackerels	-	0.0	0.0	467.4	467.4	0.0	467.4	0.0	0.0	0.0	0.0	70.1	397.32	0.19	1	0.3	0.1	0.0			
9 . Bandeng/Milk fish	-	0.0	0.0	3,086.3	3,086.3	0.0	3,086.3	0.0	0.0	0.0	0.0	462.9	2,623.32	1.22	3	4.3	0.7	0.2			
10 . Belanak/Mullets	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-			
11 . Mujair/Mozambique tilapia	-	71.7	0.0	6,222.9	6,294.5	0.0	6,294.5	0.0	0.0	0.0	0.0	944.2	5,350.34	2.49	7	6.1	1.3	0.1			
12 . Ikan mas/Common carp	-	395.5	0.0	10,446.9	10,842.4	0.0	10,842.4	0.0	0.0	0.0	0.0	1,626.4	9,216.05	4.30	12	10.1	1.9	0.2			
13 . Udang/Crab/Swim crab	-	0.0	0.0	2,721.6	2,721.6	0.0	2,721.6	0.0	0.0	0.0	0.0	408.2	2,313.40	1.08	3	2.7	0.6	0.0			
14 . Kepiting/Rajungan/Crab/Swim crab	-	0.0	0.0	0.8	0.8	0.0	0.8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.1	0.64	0.00	0	0.0	0.0	0.0			
15 . Kerang darah/Blood cockles	-	0.0	0.0	326.9	326.9	0.0	326.9	0.0	0.0	0.0	0.0	49.0	277.87	0.13	0	0.2	0.1	0.0			
16 . Cumi-cumi/Sotong/Common scids dan Cuttle fishes	-	0.0	0.0	1,721.6	1,721.6	0.0	1,721.6	0.0	0.0	0.0	0.0	258.2	1,463.40	0.68	2	1.4	0.3	0.0			
17 . Lainnya/Others	-	1,434.7	0.0	16,838.3	18,273.0	0.0	18,273.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2,740.9	15,532.02	7.24	20	15.1	2.6	0.4			
																61.9	11.4	1.1			
<b>XI . MINYAK / LEMAK</b>																					
1 . Kacang Tanah / Minyak Goreng/Cooking Oil	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0	-	-	-	-			
2 . Kopra / Minyak Goreng/Cooking Oil	0.0	0.0	0.0	169.3	169.3	0.0	169.3	0.0	0.0	0.0	0.0	2.6	166.65	0.08	0	1.9	0.0	0.2			
3 . Minyak Sawit/ Palm Oil	-	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	-	-	-	-	-			
4 . Minyak Sawit / Minyak Goreng/Palm Oils / Cooking Oils	0.0	0.0	0.0	38,739.0	38,739.0	0.0	38,739.0	0.0	0.0	0.0	0.0	600.5	38,138.55	17.78	49	439.3	-	48.7			
																441.2	0.0	48.9			
5 . Lemak Sapi / Cow Fats	8,338.0	250.1	0.0	0.0	250.1	0.0	250.1	0.0	0.0	0.0	0.0	3.7	0.0	246.44	0.11	0	2.6	0.0	0.3		
6 . Lemak Kerbau / Buffalo Fats	51.5	1.5	0.0	0.0	1.5	0.0	1.5	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	1.48	0.00	0	0.0	0.0	0.0			
7 . Lemak Kambing / Goat Fats	410.4	12.3	0.0	0.0	12.3	0.0	12.3	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	12.19	0.01	0	0.1	0.0	0.0			
8 . Lemak Domba / Mutton fats	128.3	3.8	0.0	0.0	3.8	0.0	3.8	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	3.76	0.00	0	0.0	0.0	0.0			
9 . Lemak Babi / Pig Fats	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.00	0	-	-	-			
																2.8	0.0	0.3			
																443.9	0.0	49.2			
																Nabati/Vegetal	2,241.6	52.9	62.0		
																Hewani/Animal	377.4	33.6	25.1		
																Jumlah/Total	2,618.9	86.5	87.2		